





**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Landasan Hukum	3
1.3    Maksud dan Tujuan	7
1.4    Sistematika Penulisan	7
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2    Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana	15
2.3    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4    Kelompok Sasaran Layanan	41
2.5    Mitra Perangkat Daerah	42
2.6    Kerjasama Daerah	42
2.7    Identifikasi Permasalahan	42
2.8    Isu Strategis	45
BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
3.1    Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	52
3.2    Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	54
3.3    Pentahapan	54
3.4    Lokus	57
3.5    Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	59
BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB V    PENUTUP	102

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja Perangkat Daerah	2

## **DAFTAR TABEL**

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.2	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	14
Tabel 2.3	Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.4	Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.5	Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	16
Tabel 2.6	Data Sarana Prasarana Pendukung Inklusi Gender di Ruang Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	16
Tabel 2.7	Data Sarana Prasarana Pendukung Inklusi Gender di Tempat Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	18
Tabel 2.8	Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	19
Tabel 2.9	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.10	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024	22
Tabel 2.11	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024	25
Tabel 2.12	Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 – 2024	26
Tabel 2.13	Daftar Perolehan Kursi DPRD Provinsi dan Kab/Kota Periode 2024 – 2029 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024	27
Tabel 2.14	Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Kursi DPRD Provinsi Dan Kab/Kota Di Provinsi Riau 5 (Lima) Tahun Terakhir (2020 s.d 2024)	28
Tabel 2.15	Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Riau Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024	29

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.16	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024	30
Tabel 2.17	Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017–2024	31
Tabel 2.18	Jumlah Ormas/LSM/Yayasan Bidang Disabilitas Yang Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	31
Tabel 2.19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.20	Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 di Provinsi Riau	34
Tabel 2.21	Data Jumlah Konflik di Provinsi Riau (Tahun 2020 s/d 2024)	35
Tabel 2.22	Peta Kerawanan Konflik Provinsi Riau Tahun 2024	36
Tabel 2.23	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	38
Tabel 2.24	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	39
Tabel 2.25	Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	43
Tabel 2.26	Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	46
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	53
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	55
Tabel 3.3	Lokus Wilayah Kerawanan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	57
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	59
Tabel 4.1	Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	62

		<b>Halaman</b>
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	88
Tabel 4.3	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	93
Tabel 4.4a	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	98
Tabel 4.4b	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029)	99
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	100
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami  
[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)

**"Riau Rumah Rumpun Melayu,  
Merawat Tuah Menjaga Marwah,  
Takkan Melayu Hilang di Bumi"**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

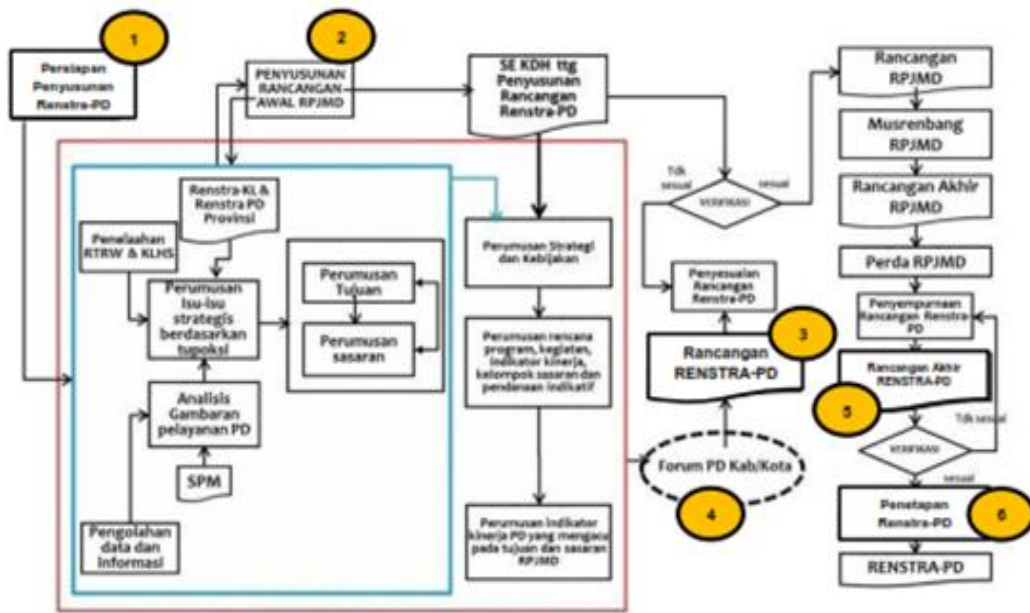
### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

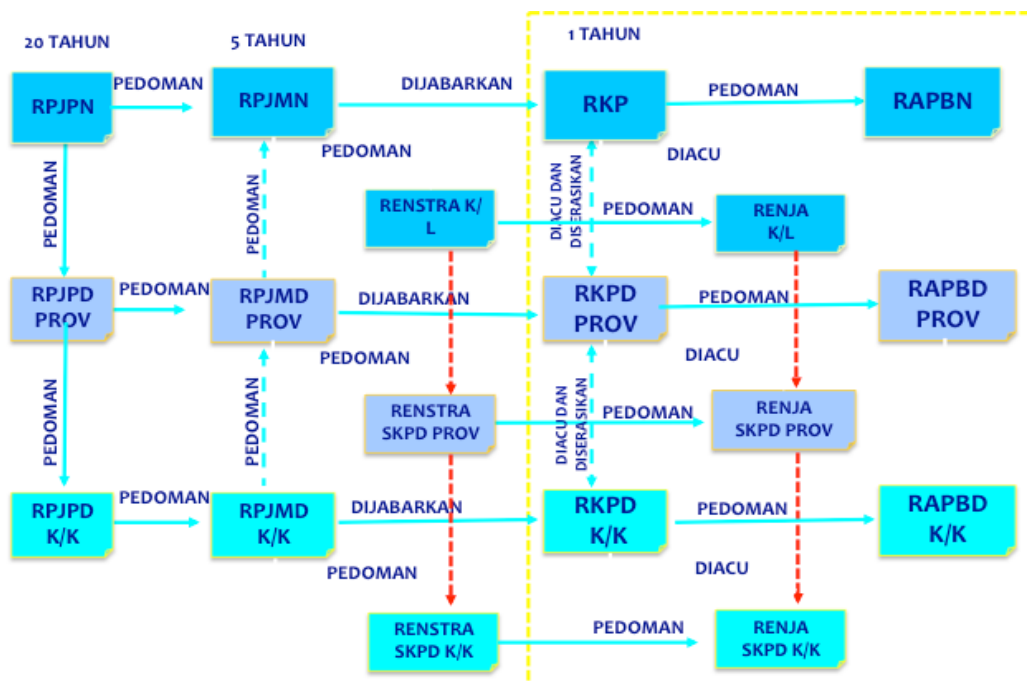
Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait, Renstra kabupaten/kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut ini :

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja Perangkat Daerah**



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender;
  13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 937);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 10);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 3);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 5);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 14);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
  34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 2);
  35. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
  36. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
  37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a) Maksud Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan

menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang responsif gender dan inklusif, berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- b) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah;
  2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
  3. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif;
  4. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
  5. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.8. Identifikasi Permasalahan
- 2.9. Isu Strategis

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah
- 3.3. Pentahapan Pembangunan
- 3.4. Lokus Renstra Perangkat Daerah
- 3.5 Arah Kebijakan

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya.

### BAB V PENUTUP Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan berbagai harapan serta komitmen terhadap pelaksanaannya.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

# **RENSTRA** **RENCANA STRATEGIS** **2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami  
[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)

**"Riau Rumah Rumpun Melayu,  
Merawat Tuah Menjaga Marwah,  
Takkan Melayu Hilang di Bumi"**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

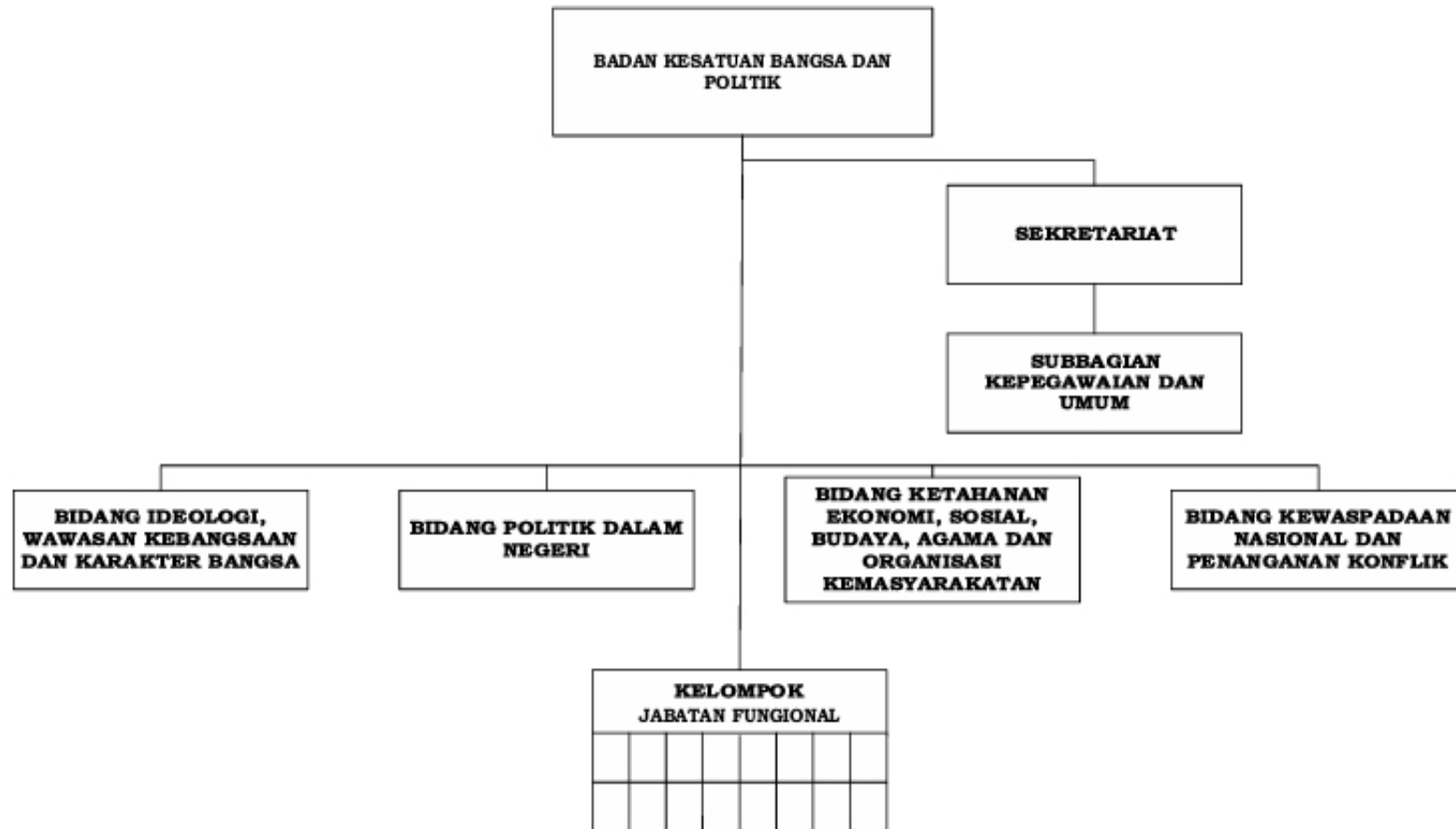
#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3. Bidang Politik Dalam Negeri;
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

## Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau



## **TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan Kesekretariatan, Bidang perumusan Ideologi, kebijakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. pelaksanaan Kesekretariatan, evaluasi Bidang dan dan Ideologi, pelaporan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pelaksanaan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Tata Kerja**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
3. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
4. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
5. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
8. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
9. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau didukung Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang hingga saat ini belum ada data sensitif disabilitas.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Data Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	J a b a t a n	PNS		PPPK		Jumlah (Orang)	Disabilitas		Ket
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		L	P	L	P		L	P	
1	Kepala Badan	1	0	0	0	1	0	0	Data Sensitif Disabilitas Pegawai pada Badan Kesbangpol Riau Belum ada
2	Sekretaris	0	1	0	0	1	0	0	
3	Kepala Bidang	2	2	0	0	4	0	0	
4	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1	0	0	0	1	0	0	
5	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	5	1	0	0	6	0	0	
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	1	0	0	0	1	0	0	
7	Arsiparis Ahli Pertama	0	0	1	0	1	0	0	
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	4	0	4	0	0	
9	Penelaah Teknis Kebijakan	15	10	0	0	25	0	0	
10	Pengawas Penyelenggara Pemilu	1	1	0	0	2	0	0	
11	Pengolah Data dan Informasi	3	2	0	0	5	0	0	
12	Pengadministrasi Perkantoran	6	2	8	9	25	0	0	
13	Operator Layanan Operasional	1	1	2	0	4	0	0	
<b>J u m l a h</b>		<b>36</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

No	J a b a t a n	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	Disabilitas		Ket
		L	P		L	P	
1	Tenaga Keamanan	6	0	6	0	0	Data Sensitif Disabilitas Pegawai pada Badan Kesbangpol Riau Belum ada
2	Tenaga Kebersihan Kantor dan Taman	5	3	8	0	0	
<b>J u m l a h</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah (Orang)	Ket
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin			
		L	P	L	P	L	P		
1	Golongan XI	0	0	0	0	0	0	Data Sensitif Disabilitas Pegawai pada Badan Kesbangpol Riau Belum ada	
2	Golongan X	0	0	0	0	0	0		
3	Golongan IX	0	0	5	0	0	0		
4	Golongan VIII	0	0	0	0	0	0		
5	Golongan VII	0	0	0	0	0	0		
6	Golongan VI	0	0	0	0	0	0		
7	Golongan V	0	0	10	9	0	0		
8	Golongan IV	9	5	0	0	0	0		
9	Golongan III	23	14	0	0	0	0		
10	Golongan II	4	1	0	0	0	0		
11	Golongan I	0	0	0	0	0	0		
<b>J u m l a h</b>		<b>36</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan pendidikan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tanpa ada data sensitif Disabilitas, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS		PPPK		Disabilitas		Jumlah (Orang)	Ket
		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		L	P		
		L	P	L	P				
1	Strata 3	0	0	0	0	0	0	Data Sensitif Disabilitas Pegawai pada Badan Kesbangpol Riau Belum ada	
2	Strata 2	13	5	0	0	0	0		
3	Strata 1	16	12	5	0	0	0		
4	Diploma 3	0	0	0	0	0	0		
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	7	3	0	19	0	0		
6	Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0		
<b>J u m l a h</b>		<b>36</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana, Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tetapi sarana dan prasarana belum adanya fasilitas yang memadai untuk penyandang Disabilitas.

Data sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

No	Nama	Jumlah	Ket
1.	Tanah	1 Unit	
2.	Peralatan & Mesin	754 Unit	
3.	Gedung & Bangunan	4 Unit	
4.	Jaringan	2 Unit	
5.	Aset tetap lainnya	320 Unit	
6.	Kendaraan Dinas & Operasional	21 Unit	
<b>J u m l a h</b>		<b>1.102 Unit</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024

**Tabel 2.6**  
**Data Sarana Prasarana Pendukung Inklusi Gender di Ruang Publik**  
**Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

<b>Jenis Sarana/Prasarana</b>	<b>Indikator Ketersediaan</b>	<b>Status (Sudah/Belum)</b>	<b>Keterangan/Catatan</b>
<b>Toilet ramah gender</b>	Toilet yang terpisah dan bersih bagi laki-laki dan perempuan	Sudah	Toilet yang aman dan mudah diakses oleh semua gender
	Tersedia toilet untuk penyandang disabilitas dan lansia	Belum	
	Tersedia fasilitas ganti popok bayi di toilet perempuan dan laki-laki	Sudah	
<b>Ruang laktasi/menyusui</b>	Tersedia ruang khusus dan nyaman untuk ibu menyusui	Belum	Ruangan ini memberikan privasi, kebersihan, dan kenyamanan bagi para ibu
<b>Ruang bermain anak</b>	Tersedia area bermain anak yang aman dan terawat di ruang publik	Belum	Memungkinkan orang tua membawa anak-anak mereka dengan nyaman dan aman
<b>Penerangan yang memadai</b>	Ketersediaan pencahayaan yang cukup di area publik	Sudah	Untuk meningkatkan rasa aman, terutama bagi perempuan di malam hari
<b>Jalur pejalan kaki dan transportasi</b>	Tersedia jalan yang aman, rata, dan mudah diakses	Sudah	Memudahkan akses bagi pejalan kaki, pengguna kursi roda, dan pengguna kereta dorong bayi

<b>Jenis Sarana/Prasarana</b>	<b>Indikator Ketersediaan</b>	<b>Status (Sudah/Belum)</b>	<b>Keterangan/Catatan</b>
<b>Pos atau layanan keamanan</b>	Pos keamanan atau petugas yang mudah dijangkau di area publik	Sudah	Memberikan perlindungan dari potensi kekerasan berbasis gender di ruang publik

**Tabel 2.7**  
**Data Sarana Prasarana Pendukung Inklusi Gender di Tempat Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

<b>Jenis Sarana/Prasarana</b>	<b>Indikator Ketersediaan</b>	<b>Status (Sudah/Belum)</b>	<b>Keterangan/Catatan</b>
<b>Kebijakan perusahaan</b>	Adanya kebijakan perlindungan dan anti-kekerasan seksual di tempat kerja	Sudah	Menjamin lingkungan kerja yang aman bagi semua gender
<b>Fleksibilitas kerja</b>	Tersedia kebijakan kerja fleksibel (jam kerja atau kerja jarak jauh)	Belum	Memudahkan pekerja, terutama perempuan, dalam menyeimbangkan pekerjaan dan tugas domestik
<b>Promosi dan kepemimpinan</b>	Proporsi karyawan perempuan dalam posisi manajerial dan kepemimpinan	Sudah	Keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan yang setara dengan laki-laki
<b>Fasilitas laktasi/ruang istirahat</b>	Tersedia ruang laktasi yang bersih dan nyaman	Belum	Mendukung hak-hak pekerja perempuan untuk menyusui saat bekerja

Jenis Sarana/Prasarana	Indikator Ketersediaan	Status (Sudah/Belum)	Keterangan/Catatan
<b>Sarana kesehatan dan keamanan kerja</b>	Tersedia prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang responsif gender	Sudah	Memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki terpenuhi di tempat kerja

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

No.	Bidang	Ruang Lingkup
1.	Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota.
2.	Politik Dalam Negeri	Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kota.
3.	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Kemasyarakatan	Ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten/Kota Ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten/ Kota.
4.	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten/Kota.

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup : penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2024. Status kondisi IKN pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 tetapi peringkat ketahanan masih cukup tangguh dengan skor 3,05. Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau, pada tahun 2021 skor 2,26 dengan peringkat ketahanan kurang tangguh. Sementara IKN Provinsi Riau tahun 2023 merupakan skor tertinggi yakni sebesar 3,08 dengan peringkat ketahanan cukup tangguh, pada gatra pertahanan dan keamanan merupakan skor tertinggi yakni sebesar 3,36 dan skor terendah sebesar 2,35 pada gatra sumber kekayaan alam. Selanjutnya untuk tahun 2024 Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari 3,08 tahun 2023 menjadi 3,05 tahun 2024, dengan nilai gatra sebagai berikut gatra geografi sebesar 3,35, gatra demografi sebesar 3,05, gatra sumber kekayaan alam sebesar 2,30, gatra ideologi sebesar 3,06, gatra politik sebesar 3,31, gatra ekonomi sebesar 3,13, gatra sosial dan budaya sebesar 2,94 dan terakhir gatra pertahanan dan keamanan sebesar 3,09.

**Tabel 2.9**  
**Indeks Ketahanan Nasional (IKN)**  
**Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

No	Gatra	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,15	Cukup Tangguh	3,48	Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh
2	Demografi	2,82	Cukup Tangguh	3,54	Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,37	Kurang Tangguh	1,44	Rawan	2,36	Kurang Tangguh	2,35	Kurang Tangguh	2,30	Kurang Tangguh
4	Ideologi	3,09	Cukup Tangguh	2,21	Kurang Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	3,00	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh
5	Politik	3,20	Cukup Tangguh	1,54	Rawan	3,24	Cukup Tangguh	3,29	Cukup Tangguh	3,31	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	3,06	Cukup Tangguh	2,67	Cukup Tangguh	3,11	Cukup Tangguh	3,16	Cukup Tangguh	3,13	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,88	Cukup Tangguh	2,18	Kurang Tangguh	2,86	Cukup Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	2,94	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	3,36	Cukup Tangguh	1,78	Rawan	3,36	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh
<b>Skor IKN</b>		<b>3,03</b>	<b>Cukup Tangguh</b>	<b>2,26</b>	<b>Kurang Tangguh</b>	<b>3,05</b>	<b>Cukup Tangguh</b>	<b>3,08</b>	<b>Cukup Tangguh</b>	<b>3,05</b>	<b>Cukup Tangguh</b>

Sumber : Labkurtannas Lemhannas RI, Tahun 2020-2024

Sementara itu kondisi demokrasi di Riau dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu :

1. Aspek Kebebasan;
2. Aspek Kesenjangan;
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Pencapaian skor IDI Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 75,66 menjadi 77,06.

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.10**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau**  
**Tahun 2021 - 2024**

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
<b>IDI Komposit</b>		<b>75,66</b>	<b>SEDANG</b>	<b>73,64</b>	<b>SEDANG</b>	<b>75.55</b>	<b>SEDANG</b>	<b>77,06</b>	<b>SEDANG</b>
<b>Aspek 1</b>	<b>Kebebasan</b>	<b>88,40</b>	TINGGI	<b>84,46</b>	TINGGI	<b>79.39</b>	SEDANG	<b>82,71</b>	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	95,53	-	95,59	-	95.67	-	100	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100	-	88,98	-	89.19	-	89,38	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	-	77,97	-	63.95	-	85,84	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat,	76,92	-	76,92	-	76.92	-	76,92	-

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
	berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan								
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	91,76	-	91,76	-	91,76	-	82,13	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	74,77	-	79,03	-	64,83	-	62,5	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	76,42	-	82,01	-	74,79	-	76,63	-
<b>Aspek 2</b>	<b>Kesetaraan</b>	<b>75,88</b>	SEDANG	<b>70,53</b>	SEDANG	<b>80,13</b>	TINGGI	<b>74,82</b>	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	93,09	-	93,84	-	95,33	-	85,35	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	-	46,15	-	100	-	46,15	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,33	-	60,83	-	63,17	-	65,33	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	54,70	-	56,24	-	65,34	-	71,67	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,58	-	95,63	-	95,77	-	96,3	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,22	-	79,59	-	84,87	-	88,37	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,92	-	72,80	-	72,64	-	74,25	-
<b>Aspek 3</b>	<b>Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>	<b>62,83</b>	SEDANG	<b>66,69</b>	SEDANG	<b>66,30</b>	SEDANG	<b>74,17</b>	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	14,29	-	33,33	-	31,82	-	66,67	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	88,90	-	85,04	-	87,55	-	85,5	-
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	30,77	-	30,77	-	30,77	-	80,77	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0,00	-	23,08	-	7,69	-	23,08	-

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
19	Jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	70,72	-	72,10	-	70,42	-	70,77	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	-	100	-	100	-	100	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	73,60	-	74,20	-	80,80	-	82,4	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100	-	100	-	100	-	62	-

Sumber : BPS Provinsi Riau, Tahun 2021-2024

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kab/Kota) tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2019, Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau mengalami penurunan. Tahun 2019 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (84,68), Pemilihan Legislatif DPR RI (84,17), DPD RI (84,38), DPRD Provinsi Riau (84,43) sementara pada tahun 2024 partisipasi masyarakat dalam pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (77,62), Pemilihan Legislatif DPR RI (77,40), DPD RI (77,44), DPRD Provinsi Riau (77,35) selanjutnya pemilihan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau juga mengalami penurunan jika tahun 2020 realisasinya sebesar 69,54 dan tahun 2024 dari target sebesar 77,5 dan realisasi 60,98. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dari target sebesar 77,5 dan realisasi hanya mencapai 59,43.

**Tabel 2.11**  
**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024**

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-rata)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pilkada Kabupaten / Kota	77,5	-	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	60,98
2	Pilgub dan Wagub		-		-		-		-		-	77,5	59,43
3	Pileg DPR RI		84,17		-		-		-		-	77,5	77,40
4	Pileg DPRD Provinsi		84,43		-		-		-		-	77,5	77,35
5	Pileg DPD RI		84,38		-		-		-		-	77,5	77,44
6	Pilpres dan Wapres		84,68		-		-		-		-	77,5	77,62

Sumber : KPU Provinsi Riau, Tahun 2024

Jumlah Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsis setiap tahunnya sejumlah 65 kursi dimana terdapat 9 partai politik antara lain partai kebangkitan bangsa sejumlah 6 kursi, partai Gerakan Indonesia raya sebesar 8 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 11 kursi, Partai Golongan Karya 10 kursi, Partai Nasional Demokrat sebesar 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 1 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan Partai Demokrat sebesar 8 kursi. Distribusi perolehan kursi DPRD Provinsi Riau dapat dilihat pada table di bawah :

**Tabel 2.12**  
**Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 – 2024**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD RIAU	TAHUN DAN JENIS KELAMIN											
			2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	8	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	9	1	9	1	8	2	8	2	8	2	9	2
4	Partai Golongan Karya	11	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	4
5	Partai Nasional Demokrat	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	7	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	10	0
7	Partai Persatuan Pembangunan	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0
8	Partai Amanat Nasional	7	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	5	0
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
10	Partai Demokrat	9	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	6	2
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>11</b>

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024

**Tabel 2.13**  
**Daftar Perolehan Kursi DPRD Provinsi dan Kab/Kota Periode 2024 – 2029**  
**Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024**

NO URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DI DPRD PROVINSI/KAB/KOTA													JUMLAH	%
		RIAU	KMPR	BNGKLS	INHIL	INHU	ROHIL	ROHUL	PLLWN	SIAK	KUANS	MRNTI	PKU	DUMAI		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	4	5	7	5	4	3	5	4	3	3	2	1	<b>52</b>	9,29
2	PARTAI GERINDRA	8	8	5	6	3	3	6	3	4	9	3	7	5	<b>70</b>	12,50
3	PDI PERJUANGAN	11	4	10	5	4	6	8	12	4	5	5	7	6	<b>87</b>	15,54
4	PARTAI GOLKAR	10	7	3	6	5	10	6	6	8	5	3	5	5	<b>79</b>	14,11
5	PARTAI NASDEM	6	5	5	5	7	5	4	1	4	3	3	5	6	<b>59</b>	10,54
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PARTAI GELORA INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10	3	5	2	-	5	3	4	4	2	3	8	4	<b>53</b>	9,46
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PARTAI HANURA	-	-	-	-	3	2	1	2	1	-	-	2	-	<b>11</b>	1,96
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	5	3	1	4	2	5	4	6	3	5	6	2	<b>51</b>	9,11
13	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	0,36
14	PARTAI DEMOKRAT	8	5	3	6	5	6	6	3	2	5	2	8	3	<b>62</b>	11,07
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	<b>4</b>	0,71
16	PARTAI PERINDO	-	-	3	1	2	-	-	-	2	-	-	-	1	<b>9</b>	1,61
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	4	1	6	1	1	1	-	1	-	2	-	2	<b>20</b>	3,57
24	PARTAI UMMAT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	0,18
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>560</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024

**Tabel 2.14**  
**Persentase Keterwakilam Perempuan Pada Kursi DPRD Provinsi Dan Kab/Kota Di Provinsi Riau**  
**5 (Lima) Tahun Terakhir (2020 s.d 2024)**

NO URUT	PROVINSI/KAB/KOTA	JUMLAH KURSI	TAHUN				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	PROVINSI RIAU	65	18,46	21,54	21,54	23,08	16,92
2	KAMPAR	45	8,89	8,89	8,89	8,89	0,07
3	BENGKALIS	45	8,89	8,89	8,89	8,89	0,17
4	INDRAGIRI HILIR	45	13,33	13,33	13,33	13,33	0,13
5	INDRAGIRI HULU	40	2,50	2,50	2,50	5,00	0,08
6	ROKAN HILIR	45	17,78	17,78	17,78	15,56	0,09
7	ROKAN HULU	45	4,44	4,44	4,55	4,44	0,11
8	PELALAWAN	35	0,01	2,86	2,86	5,71	0,05
9	SIAK	40	2,50	2,50	2,50	2,50	0,05
10	KUANTAN SINGINGI	35	2,86	2,94	2,94	5,88	0,06
11	KEPULAUAN MERANTI	30	13,33	13,33	13,33	13,33	0,27
12	PEKANBARU	50	17,78	20,00	20,00	20,00	0,16
13	DUMAI	35	6,67	6,90	6,67	6,67	0,03

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024

Dilihat dari Tabel 2.14 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, bahwa keterwakilan perempuan adalah 30 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tapi lihat dari tabel diatas, secara umum baik DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dari 5 (lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai 30 persen, hal ini menggambarkan masih lemahnya keterwakilan perempuan yang berkecimpung di parlemen.

Paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah DPRD Provinsi Riau, yang pada tahun 2020 mencapai 18,46 Persen dan terakhir tahun 2024 turun sehingga menjadi 16,92 persen, sementara DPRD Kabupaten/Kota yang keterwakilan perempuannya rata – rata masih sangat rendah dari hasil Pemilu Legislatif pada Tahun 2024, tetapi dari semua daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, keterwakilan Perempuan di Parlemen tetap ada, walaupun sangat rendah dari ambang batas yang telah ditentukan.

**Tabel 2.15**  
**Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Riau Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024**

NO URUT	PROVINSI/KAB/KOTA	JUMLAH KURSI	TAHUN 2024			
			Laki-Laki	Perempuan	(%) Laki-laki	(%) Perempuan
1	PROVINSI RIAU	2	2	0	100	0
2	KAMPAR	2	1	1	50	50
3	BENGKALIS	2	1	1	50	50
4	INDRAGIRI HILIR	2	1	1	50	50
5	INDRAGIRI HULU	2	2	0	100	0
6	ROKAN HILIR	2	2	0	100	0
7	ROKAN HULU	2	2	0	100	0
8	PELALAWAN	2	2	0	100	0
9	SIAK	2	1	1	50	50
10	KUANTAN SINGINGI	2	2	0	100	0
11	KEPULAUAN MERANTI	2	2	0	100	0
12	PEKANBARU	2	2	0	100	0
13	DUMAI	2	2	0	100	0

Sumber : Sekretariat Dewan Riau, Tahun 2024

Dilihat dari tabel 2.15 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak di Provinsi Riau masih dominan laki-laki dari pada perempuan sebab dari 12 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi terdapat delapan Kab/Kota dan satu Provinsi di pimpin oleh Kepala Daerah Berjenis kelamin laki-laki dan hanya empat Kab/Kota Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pimpin oleh kepala daerah perempuan yakni : Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak.

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih belum bisa bersaing dan dipercayai untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

**Tabel 2.16**  
**Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024**

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
1	Kampar	862	126	534	304	72	141
2	Indragiri Hulu	667	100	301	192	76	132
3	Bengkalis	792	101	481	210	46	153
4	Indragiri Hilir	798	112	403	227	97	207
5	Pelalawan	463	61	207	118	37	97
6	Rokan Hulu	710	78	320	213	65	112
7	Rokan Hilir	689	73	356	181	50	135
8	Siak	476	72	224	138	32	78
9	Kuantan Singingi	443	60	192	145	48	109
10	Kepulauan Meranti	511	88	196	151	44	131
11	Kota Pekanbaru	595	77	512	206	36	133
12	Kota Dumai	437	66	198	94	27	71
<b>JUMLAH</b>		<b>7443</b>	<b>1014</b>	<b>3924</b>	<b>2179</b>	<b>630</b>	<b>1499</b>

Sumber : Aplikasi Sidalih KPU, Tahun 2024

Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang terdaftar pada tahun 2017 hingga 2024 berjumlah 341. Dimana jumlah ormas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 43 sedangkan LSM di tahun 2020 sebesar 11 dan untuk jumlah Yayasan pada tahun 2022 sebanyak 14 yayasan. Hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 8 yayasan, sedangkan pada tahun 2024 jumlah Ormas/LSM dan Yayasan yang terdaftar mengalami penurunan dengan jumlah 37 Ormas/LSM dan Yayasan. Yang terdiri dari Ormas sejumlah 31, LSM sejumlah 2 dan Yayasan sejumlah 4.

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017–2024**

No	Tahun	Ormas	LSM	Yayasan	Jumlah
1	2017	23	5	12	<b>40</b>
2	2018	20	1	6	<b>27</b>
3	2019	34	4	7	<b>45</b>
4	2020	33	11	4	<b>48</b>
5	2021	29	5	5	<b>39</b>
6	2022	33	8	14	<b>55</b>
7	2023	43	4	3	<b>50</b>
8	2024	31	2	4	<b>37</b>
<b>Total</b>		<b>246</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>341</b>

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2017-2024

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Ormas/LSM/Yayasan Bidang Disabilitas Yang Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau**

No	Nama Ormas / LSM / Yayasan	Tahun Mendaftar
1	Korps Cacat Veteran RI Provinsi Riau	2012
2	Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC)	2012
3	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Riau	2015
4	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecatatan Provinsi Riau	2016

No	Nama Ormas / LSM / Yayasan	Tahun Mendaftar
5	DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Riau	2017
6	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Provinsi Riau	2021
7	Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU)	2022
8	Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia Provinsi Riau	2023

*Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2024*

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 84,23 dengan status kondisi rukun, hal ini dikarenakan 2 (dua) dimensi mengalami kenaikan, yang meliputi dimensi kesetaraan tahun 2023 sebesar 77,61 naik di tahun 2024 sebesar 84,92 dan dimensi kerjasama tahun 2023 sebesar 75,59 naik di tahun 2024 sebesar 84,38.

Sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 masih diatas rata – rata nasional, dengan nilai yang mengalami kenaikan signifikan tersebut maka secara peringkat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 juga mengalami kenaikan yakni mendapatkan peringkat 2 (dua) secara nasional dan hanya kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.19**  
**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**  
**Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

No	Indeks	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi
1	Kesetaraan	68,30	Rukun	69,20	Rukun	75,32	Rukun	77,61	Rukun	84,92	Rukun
2	Toleransi	68,30	Rukun	60,80	Rukun	70,39	Rukun	74,46	Rukun	72,50	Rukun
3	Kerjasama	71,18	Rukun	70,00	Rukun	73,65	Rukun	75,59	Rukun	84,38	Rukun
<b>Skor Nasional</b>		<b>67,46</b>	Rukun	<b>72,39</b>	Rukun	<b>73,09</b>	Rukun	<b>76,02</b>	Rukun	<b>76,47</b>	Rukun
<b>Skor IKUB Riau</b>		<b>69,26</b>	Rukun	<b>66,67</b>	Rukun	<b>74,32</b>	Rukun	<b>71,60</b>	Rukun	<b>84,23</b>	Rukun
<b>Peringkat</b>		<b>31</b>		<b>31</b>		<b>16</b>		<b>31</b>		<b>2</b>	

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Tahun 2020-2024

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, potensi konflik dan kriminalitas yang mungkin terjadi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai premanisme, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, Narkoba dan pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Data kriminalitas dan konflik yang terjadi di Provinsi Riau dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.20**  
**Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 di Provinsi Riau**

No.	Kriminalitas	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kasus	8.444	8.338	9.072	9.083	8.273	-0,12
2	Jumlah Penduduk	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.874	6.794.944	-0,42
3	Angka Kriminalitas	0,0013	0,0012	0,0013	0,0013	0,0012	0,68

*Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka, Tahun 2020-2024*

Pada umumnya jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Riau berfluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata penurunan 0,12% per tahun.

Berdasarkan data jumlah konflik yang ada dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kejadian konflik di Provinsi Riau menurun dari 154 kejadian konflik menjadi 19 kejadian konflik. Namun dari jenis konflik yang ada jenis konflik Sosial Budaya dan Wilayah yang masih tinggi tetapi mengalami penurunan.

**Tabel 2.21**  
**Data Jumlah Konflik di Provinsi Riau**  
**(Tahun 2020 s/d 2024)**

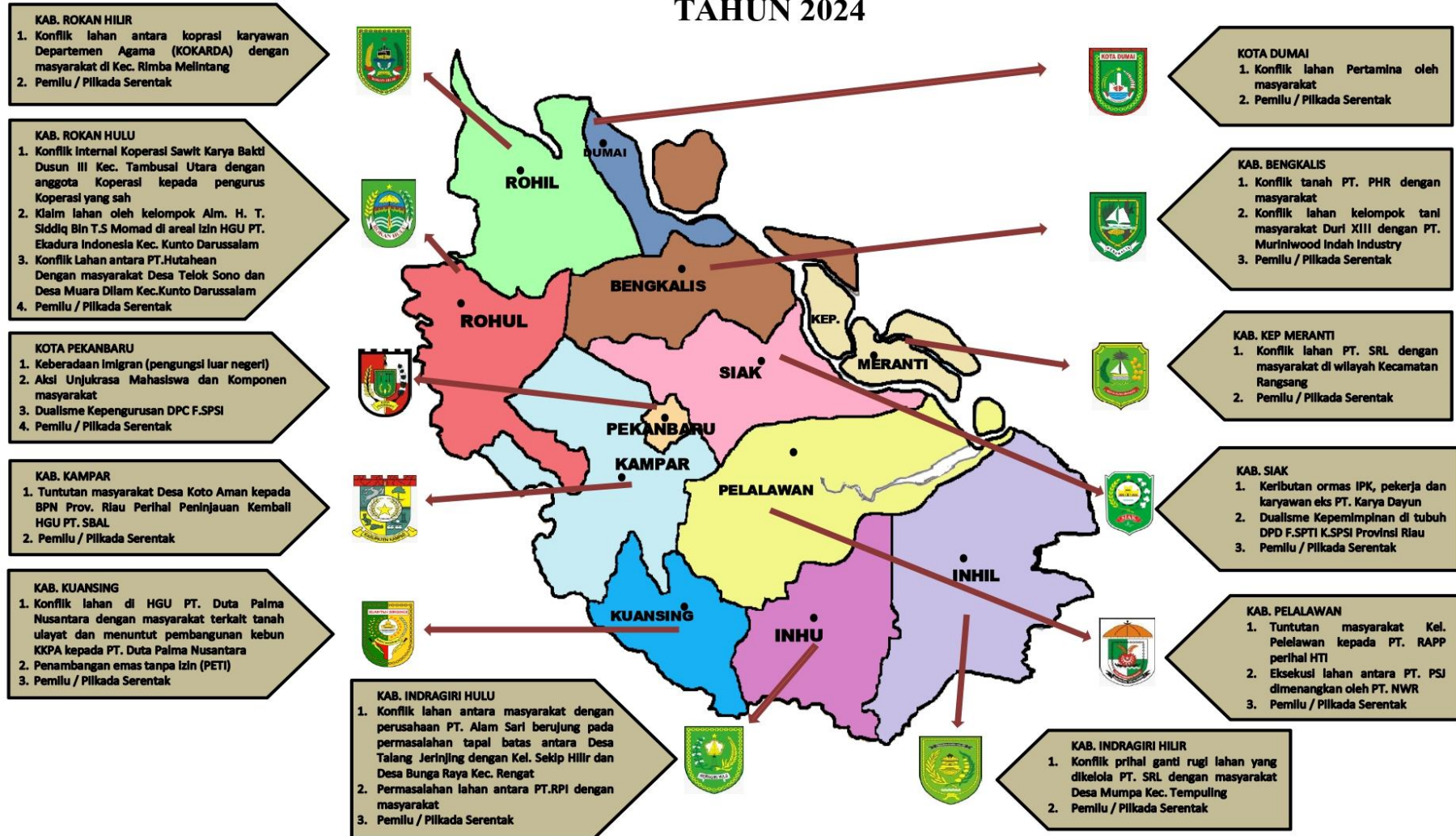
No	Jenis Konflik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sosial Budaya (Sosbud)	102	28	35	31	3
2	Wilayah	15	54	51	2	15
3	SARA	11	8	4	-	1
4	Sumber Daya Alam (SDA)	26	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>154</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>19</b>

*Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Tahun 2020-2024*

Dari data angka unjuk rasa, kriminalitas dan konflik terjadi di Provinsi Riau, yang terjadi beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sehingga bisa di kategorikan berhasil di kendalikan.



**Tabel 2.22**  
**PETA KERAWANAN KONFLIK PROVINSI RIAU**  
**TAHUN 2024**



Pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada level organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memperoleh nilai 65,41 dengan kategori B atau “Baik”, hal tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada level organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memperoleh nilai 67,55 dengan kategori B atau “Baik”, hal tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi kinerja.

Sementara itu pada tahun 2023 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 1,35 dari Tahun 2022 sebesar 67,55 sehingga nilai Tahun 2023 menjadi 68,90 dengan predikat "Baik". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "B", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja dan tahun 2024 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau kembali menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,55 dari Tahun 2023 sebesar 68,90 sehingga nilai Tahun 2024 menjadi 69,45 dengan predikat "Baik". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "B", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

**Tabel 2.23**  
**Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

NO	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	21,94	30	21,30	30	21,30	30	21,30
2	Pengukuran Kinerja	25	17,50	30	18,90	30	19,80	30	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15	10,97	15	10,90	15	10,80	15	10,35
4	Evaluasi Internal	10	8,08	25	17,00	25	17,00	25	18,00
5	Capaian Kinerja	20	7,42	-		-		-	
<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>		<b>100</b>	<b>65,91</b>	<b>100</b>	<b>67,55</b>	<b>100</b>	<b>68,90</b>	<b>100</b>	<b>69,45</b>
<b>TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA</b>			<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>

**Tabel 2.24**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD								Realisasi Capaian								Catatan Analisis
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			73,79	Poin	75,11	Poin	76,01	Poin	76,92	Poin	66,67	Poin	74,32	Poin	71,60	Poin	84,23	Poin	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			73,60	Poin	79,16	Poin	80,31	Poin	81,46	Poin	75,66	Poin	73,64	Poin	75,55	Poin	77,06	Poin	
	Indeks Toleransi Umat Beragama			72,50	Poin	72,83	Poin	74,15	Poin	75,96	Poin	60,80	Poin	68,45	Poin	70,04	Poin	72,50	Poin	
	Indeks Kerjasama Umat Beragama			74,15	Poin	75,71	Poin	77,03	Poin	78,84	Poin	70,00	Poin	77,65	Poin	71,17	Poin	84,38	Poin	
	Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			74,50	Persen	75,00	Persen	75,50	Persen	76,00	Persen	74,50	Persen	75,00	Persen	75,50	Persen	76,00	Persen	
	Indeks Kebebasan			88,40	Poin	89,15	Poin	89,90	Poin	90,65	Poin	88,40	Poin	84,46	Poin	79,39	Poin	82,71	Poin	
	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi			62,83	Poin	63,58	Poin	64,33	Poin	65,08	Poin	62,83	Poin	66,69	Poin	66,30	Poin	74,17	Poin	
	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan			0,00	Persen	75,00	Persen	75,50	Persen	76,00	Persen	0,00	Persen	75,00	Persen	75,50	Persen	76,00	Persen	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi			3,13	Poin	3,13	Poin	3,15	Poin	3,17	Poin	3,13	Poin	2,93	Poin	3,00	Poin	3,06	Poin	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik			3,24	Poin	3,24	Poin	3,26	Poin	3,28	Poin	3,24	Poin	3,24	Poin	3,29	Poin	3,31	Poin	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD								Realisasi Capaian								Catatan Analisis
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu			69,54	Persen	69,54	Persen	69,54	Persen	75,50	Persen	69,54	Persen	69,54	Persen	69,54	Persen	75,50	Persen	
	Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi			75,00	Persen	75,00	Persen	75,05	Persen	75,10	Persen	75,00	Persen	75,00	Persen	75,05	Persen	75,10	Poin	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi			3,10	Poin	3,10	Poin	3,12	Poin	3,14	Poin	3,10	Poin	3,11	Poin	3,16	Poin	3,13	Poin	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya			2,92	Poin	2,92	Poin	2,94	Poin	2,96	Poin	2,92	Poin	2,86	Poin	2,93	Poin	2,94	Poin	
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			75,00	Persen	75,00	Persen	75,05	Persen	75,10	Persen	75,00	Persen	75,00	Persen	75,05	Persen	75,10	Persen	

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah upaya untuk melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Selain itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dialog yang ada di masyarakat seperti :

- a. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (FPK);
- b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tindaklanjut dari Permendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat;
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Sehubungan hal diatas Kelompok Sasaran Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Riau;
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
3. Masyarakat;
4. Kelompok lintas Agama, suku bangsa dan ras;
5. Kelompok milenial pemuda;

6. Disabilitas;
7. Mahasiswa;
8. Siswa dan pelajar.

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah :

1. Unsur FORKOPIMDA Provinsi;
2. Lembaga vertikal lain, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Kemenkum dan Ham Provinsi Riau, KPU Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau;
3. Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Riau;
4. Seluruh OPD Provinsi Riau;
5. Kemenag Provinsi Riau;
6. Partai Politik;
7. Organisasi Masyarakat;
8. FKUB Provinsi Riau;
9. FPK Provinsi Riau;
10. FKDM Provinsi Riau;

## 2.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.

## 2.7 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat di identifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 2.25**  
**Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya tingkat Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Kurangnya tingkat Toleransi, Kerjasama Antar Umat Beragama Kemasyarakatan	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi tentang Kerukunan Umat Beragama di masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menurunnya tingkat Kerukunan umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
2.	Masih Adanya Konflik Sosial di Masyarakat	Kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran FPK, FKUB, FKPT, FKDM, PPWK, Tim Pora dan Timdu PKS serta Satgas PKH	Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih terdapat konflik lahan dikawasan konservasi Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang mengalami alih fungsi menjadi perkebunan sawit ilegal dan pemukiman
		Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini	Masih munculnya konflik sosial dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah
			Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat
			Masih adanya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan Masih adanya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras
3.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik	Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap Politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih kurangnya pembinaan terhadap peran Ormas dan LSM
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada
		Masih rendahnya representasi perempuan di	Budaya patriarki yang telah mengakar kuat memberikan posisi superior pada laki-laki

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		bidang politik dan publik	Tidak semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai tentang isu gender dan dampaknya
4.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai – nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap Nilai – nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial

Bahwa keterwakilan perempuan adalah 30 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, secara umum baik DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dari 5 (lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai 30 persen, hal ini menggambarkan masih lemahnya keterwakilan perempuan yang berkecimpung di parlemen.

Paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah DPRD Provinsi Riau, yang pada tahun 2020 mencapai 18,46 Persen dan terakhir tahun 2024 turun sehingga menjadi 16,92 persen, sementara DPRD Kabupaten/Kota yang keterwakilan perempuannya rata – rata masih sangat rendah dari hasil Pemilu Legislatif pada Tahun 2024, tetapi dari semua daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, keterwakilan Perempuan di Parlemen tetap ada, walaupun sangat rendah dari ambang batas yang telah ditentukan.

Sementara itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak di Provinsi Riau masih dominan laki-laki dari pada perempuan sebab dari 12 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi terdapat delapan Kab/Kota dan satu Provinsi di pimpin oleh Kepala Daerah Berjenis kelamin laki-laki dan hanya empat Kab/Kota Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pimpin oleh kepala daerah perempuan yakni : Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak.

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih belum bisa bersaing dan dipercayai untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Untuk solusi permasalahan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah mengalokasikan bantuan keuangan partai politik setiap tahun yang bisa digunakan untuk pembiayaan kampanye, pelatihan, pengkaderan bagi perempuan dan lain-lain.

## **2.8 Isu Strategis**

Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.26**  
**Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Melemahnya pemahaman nilai nilai Pancasila yang digunakan dalam bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara.	Globalisasi memungkinkan penyebaran ideologi asing, disinformasi, dan individualisme yang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Wawasan kebangsaan membantu masyarakat untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi dan pengaruh dari luar.	Penurunan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dapat menyebabkan berbagai persoalan bangsa yang dapat melemahkan dan mengganggu ketahanan nasional. Persoalan tersebut dapat berupa konflik, kerusuhan, dan ancaman terhadap kedaulatan negara	Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air karena dapat menciptakan perbedaan persepsi, bahkan polarisasi, terkait identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini perlu diatasi melalui edukasi yang kuat dan pendekatan yang inklusif untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan harmonis tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa	Melemahnya pemahaman Nilai Nilai pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya	Melemahnya integritas partai politik dan masih rendahnya	Memungkinkan melemahnya nilai-nilai demokrasi dengan mempengaruhi proses	Melemahnya struktur dan substansi demokrasi, praktik politik uang,	Dinasti politik yang marak dapat menghambat representasi yang adil dan tata kelola yang	Mengefektifkan Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang responsif gender dan inklusif	pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	potensi keterwakilan perempuan di parlemen	pengambilan keputusan di pemerintah melalui pengaruh korporasi besar. Selain itu, munculnya negara-negara "nakal" dan tindakan teroris dapat merusak stabilitas negara dan hubungan internasional. Isu-isu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat juga menjadi fokus dalam politik internasional dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara	dinasti politik, dan ketidaksetaraan akses informasi serta partai politik masih kurang memberikan dukungan terhadap keterwakilan perempuan	demokratis. Selain itu, isu-isu seperti polarisasi politik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mengancam demokrasi, selanjutnya secara umum isu-isu gender berakar pada budaya patriarki, hambatan struktural dalam sistem politik dan stereotip gender yang menghambat perempuan untuk terlibat secara setara	dan peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat khususnya terhadap kaderisasi perempuan dan Disabilitas di partai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT	Peningkatan Peran Ormas melalui Penguatan kelembagaan, pengawasan dan pemberdayaan	Dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait keberadaan dan aktivitas ormas tersebut, serta dapat memicu potensi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan masyarakat.	Keberadaan ormas yang tidak terdaftar menimbulkan beberapa implikasi, termasuk potensi sanksi dan pembatasan akses terhadap pelayanan publik.	Ormas yang tidak terdaftar dapat mengalami berbagai kesulitan, seperti stigma sebagai organisasi ilegal, pembatasan akses ke sumber daya negara, dan bahkan pembubaran	Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Masih adanya dijumpai penyalahgunaan narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya	Masih adanya konflik sosial dan gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Situasi terkini masalah narkoba dalam lingkup global menjadi pembahasan yang utama dalam sidang Commission on Narcotic Drug (CND) di markas PBB di Wina, Austria. Deklarasi politis pada tahun 2009 lalu telah menguatkan komitmen anggota PBB dalam melaksanakan sistem penanganan masalah narkotika internasional.	Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.	Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dilihat dari wilayah regional, Provinsi Riau merupakan pengungkapan yang terbesar setelah Provinsi Sumatera Utara, hal ini dikarenakan Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar seperti Malaysia, Singapore dan Brunai, selain itu beberapa wilayah di Provinsi Riau merupakan daerah pesisir sehingga akan memudahkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk bereaksi melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba	Kerukunan Umat Beragama khususnya perlu menjadi perhatian untuk mejamin kerukunan umat beragama dan Berkembangnya penyalahgunaan narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
			Sementara itu, rencana aksi yang ditetapkan pada tahun tersebut menjadi garis besar dalam upaya mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika,	Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
				upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya		
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Masih adanya konflik sosial dan gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatnya pemahaman radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme	Terorisme dapat mengganggu ketertiban dan menciptakan ketakutan di masyarakat, sementara konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu akses layanan dasar, seperti yang masih terjadi pada perang Palestina - Israel, Ukraina - Rusia dan India-Palestina	Konflik sosial, yang meliputi perpecahan etnis, agama, atau kepentingan ekonomi, dapat menciptakan ketegangan dan kekacauan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan ketertiban juga dapat mengancam keamanan dan stabilitas, serta mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial	Konflik sosial dapat memicu perpecahan masyarakat, hilangnya rasa percaya, dan mengancam integrasi sosial. Gangguan ketertiban dapat mengganggu stabilitas daerah dan berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat.	Konflik Sosial di Masyarakat



## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

# **RENSTRA** **RENCANA STRATEGIS** **2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami  
[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)

**"Riau Rumah Rumpun Melayu,  
Merawat Tuah Menjaga Marwah,  
Takkan Melayu Hilang di Bumi"**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	INDIKATOR <i>(04)</i>	BASELINE 2024 <i>(05)</i>	TARGET TAHUN						KET <i>(12)</i>
					2025 <i>(06)</i>	2026 <i>(07)</i>	2027 <i>(08)</i>	2028 <i>(09)</i>	2029 <i>(10)</i>	2030 <i>(11)</i>	
Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	77,06	77,36	77,66	77,96	78,26	78,56	78,86	
			Indeks Harmoni Religius	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Harmoni Sosial	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	74,17	74,47	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi	Indeks Kebebasan	82,71	83,01	83,31	83,61	83,91	84,21	84,51	
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerjasama	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Toleransi	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Kewarganegaraan	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Pluralisme	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,45	70,25	70,75	71,25	71,75	72,25	72,75	

### **3.2 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi program prioritas dalam RPJMD. Strategi Renstra Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selain itu untuk memenuhi isu gender dan disabilitas di parlemen dan kepala daerah/wakil kepala daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau juga mempunyai strategi salah satunya yaitu memberikan bantuan keuangan partai politik yang duduk di parlemen setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk biaya kampanye, pelatihan dan pengkaderan bagi perempuan.

### **3.3 Pentahapan**

Setelah dirumuskan, maka setiap pentahapan Renstra – PD dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, pentahapan Renstra – PD dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pentahapan Renstra – PD yang disusun dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pentahapan Renstra – PD ini dapat dijadikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Riau**



**Fokus Renstra Tahun Pertama (2026)**

Fokus Renstra pada tahap awal Renstra – PD ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periodisasi pelaksanaan Renstra – PD 2019-2024 dalam upaya untuk memperkuat dan meningkatkan fondasi yang mendasari perubahan dan kemajuan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan HAM.

**Fokus Renstra Tahun Kedua (2027)**

Renstra tahun kedua ini merupakan lanjutan dari tahun pertama. fokus Renstra diarahkan untuk memperkokoh Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, menguatkan komitmen dan loyalitas masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan membangun masyarakat yang berkarakter dan berbudaya Pancasila.

### **Fokus Renstra Tahun Ketiga (2028)**

Renstra tahun ketiga ini merupakan lanjutan dari tahun kedua. Karena itu fokus Renstran diarahkan untuk meningkatkan Kerukunan Umat Beragama berarti mempromosikan dan memperkuat harmoni, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, stabil, dan inklusif, dimana setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut atau diskriminasi.

### **Fokus Renstra Tahun Keempat (2029)**

Pada tahun keempat ini, fokus renstra ditujukan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi dan Pemerintahan berarti mempromosikan dan memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### **Fokus Renstra Tahun Kelima (2030)**

Pada tahap akhir dari Renstra – PD ini, selain untuk melanjutkan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, juga untuk memastikan tercapainya sasaran Renstra sesuai dengan target yang ditetapkan. Karena itu, fokus renstra diarahkan untuk Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM di Provinsi Riau berarti menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, di mana nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia dihormati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM, Provinsi Riau dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

## **3.4 Lokus**

Lokus wilayah kerawanan konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Lokus Wilayah Kerawanan Konflik**  
**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau**

No.	Kabupaten/ Kota	Kerawanan Konflik	Keterangan
1	Rokan Hilir	1. Konflik lahan antara koprasi karyawan Departemen Agama (KOKARDA) dengan masyarakat di Kec. Rimba Melintang 2. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi
2	Rokan Hulu	1. Konflik internal Koperasi Sawit Karya Bakti Dusun III Kec. Tambusai Utara dengan anggota Koperasi kepada pengurus Koperasi yang sah 2. Klaim lahan oleh kelompok Alm. H. T. Siddiq Bin T.S Momad di areal izin HGU PT. Ekadura Indonesia Kec. Kunto Darussalam 3. Konflik Lahan antara PT. Hutahean Dengan masyarakat Desa Telok Sono dan Desa Muara Dilam Kec.Kunto Darussalam 4. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi 4. Sudah terfasilitasi
3	Kota Pekanbaru	1. Keberadaan imigran (pengungsi luar negeri) 2. Aksi Unjuk rasa Mahasiswa dan Komponen masyarakat 3. Dualisme Kepengurusan DPC F.SPSI 4. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi 4. Sudah terfasilitasi
4	Kampar	1. Tuntutan masyarakat Desa Koto Aman kepada BPN Prov. Riau Perihal Peninjauan Kembali HGU PT. SBAL 2. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi
5	Pelalawan	1. Tuntutan masyarakat Kel. Pelelawan kepada PT. RAPP perihal HTI 2. Eksekusi lahan antara PT. PSJ dimenangkan oleh PT. NWR 3. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi

No.	Kabupaten/ Kota	Kerawanan Konflik	Keterangan
6	Kuansing	1. Konflik lahan di HGU PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat terkait tanah ulayat dan menuntut pembangunan kebun KKPA kepada PT. Duta Palma Nusantara 2. Penambangan emas tanpa izin (PETI) 3. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi
7	Indragiri Hulu	1. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan PT. Alam Sari berujung pada permasalahan tapal batas antara Desa Talang Jerinjing dengan Kel. Sekip Hilir dan Desa Bunga Raya Kec. Rengat 2. Permasalahan lahan antara PT. RPI dengan masyarakat 3. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi
8	Indragiri Hilir	1. Konflik prihal ganti rugi lahan yang dikelola PT. SRL dengan masyarakat Desa Mumpa Kec. Tempuling 2. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi
9	Kota Dumai	1. Konflik lahan Pertamina oleh masyarakat 2. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi
10	Bengkalis	1. Konflik tanah PT. PHR dengan masyarakat 2. Konflik lahan kelompok tani masyarakat Duri X!!! dengan PT. Muriniwood Indah Industry 3. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi
11	Kepulauan Meranti	1. Konflik lahan PT. SRL dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Rangsang 2. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi
12	Siak	1. Keributan ormas IPK, pekerja dan karyawan eks PT. Karya Dayun 2. Dualisme Kepemimpinan di tubuh DPD F.SPTI K.SPSI Provinsi Riau 3. Pemilu / Pilkada Serentak	1. Sudah terfasilitasi 2. Sudah terfasilitasi 3. Sudah terfasilitasi

### 3.5 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Provinsi Riau**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	
			Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi tentang Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat	
			Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan harmonisasi dan moderasi beragama serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
			Dukungan Peningkatan Toleransi, Kerjasama dan Kesetaraan antar Umat beragama	
			Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB, FPK, FKDM, Kominda dan Forkopimda serta tim terpadu penanganan konflik sosial	
			Penguatan tim pengawasan orang asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
			Fasilitasi Penanganan konflik sosial	
			Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat	

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
			Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainnya hingga Kab/ Kota	
			Penguatan fungsi tim kewaspadaan dini (TKD) pemerintah daerah dalam pelaporan pada sistim LAPSITDA terkait ATHG yang berpotensi konflik	
			Meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional di Daerah dan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial serta Kerjasama Intelijen	

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

# **RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami  
[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)

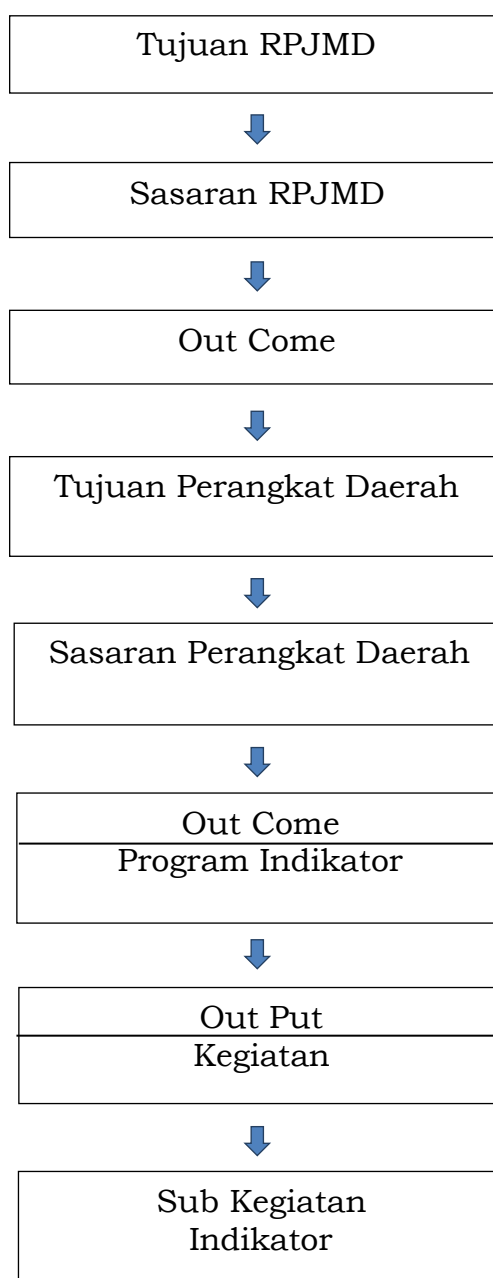
**"Riau Rumah Rumpun Melayu,  
Merawat Tuah Menjaga Marwah,  
Takkan Melayu Hilang di Bumi"**

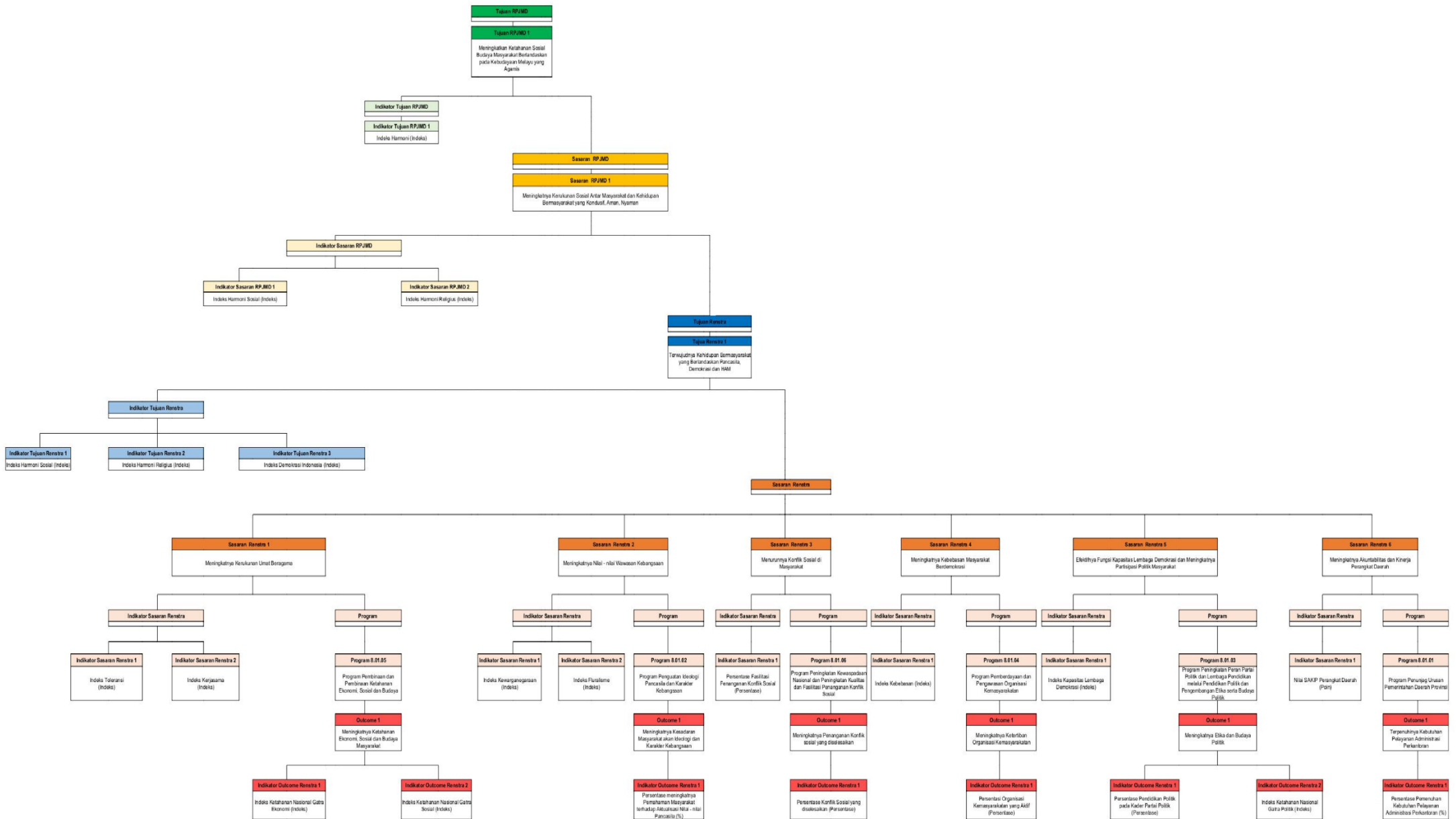
## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Berikut kerangka perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan :





Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>		
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama			Indeks Harmoni Sosial (Indeks)				
					Indeks Harmoni Religius (Indeks)				
					Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)				
					Indeks Toleransi (Indeks)				
					Indeks Kerjasama (Indeks)				
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat					Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
							Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Responsif Gender
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan			Indeks Kewarganegaraan (Indeks)		
					Indeks Pluralisme (Indeks)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka	Responsif Gender
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat			Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Responsif Gender
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi			Indeks Kebebasan (Indeks)		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Responsif Gender
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatnya etika dan budaya politik		Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)		
					Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik ( )	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Responsif Gender
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		8.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		8.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		8.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2  
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT COME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			20,236,477,641.00	21,000,630,839.00	21,000,630,839.00	21,632,780,879.00	22,280,977,122.00	22,840,190,204.00					
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			20,236,477,641.00	21,000,630,839.00	21,000,630,839.00	21,632,780,879.00	22,280,977,122.00	22,840,190,204.00					
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100 Persen	15,452,596,976.00	100 Persen	15,957,272,370.00	100 Persen	16,395,042,593.00	100 Persen	16,843,010,000.00	100 Persen	17,256,733,651.00	
0.00.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	150,000,000.00	7 Dokumen	145,000,000.00	7 Dokumen	150,923,928.00	7 Dokumen	163,010,000.00	7 Dokumen	170,000,000.00	
0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	150,000,000.00	7 Dokumen	130,000,000.00	7 Dokumen	130,923,928.00	7 Dokumen	138,010,000.00	7 Dokumen	140,000,000.00	
0.00.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		0 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	
0.00.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	11,977,537,264.00	1 Laporan	12,825,000,000.00	1 Laporan	12,825,000,000.00	1 Laporan	13,035,000,000.00	1 Laporan	13,290,423,928.00	
0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		88 Orang	11,977,537,264.00	88 Orang	12,500,000,000.00	88 Orang	12,800,000,000.00	88 Orang	13,000,000,000.00	88 Orang	13,250,000,000.00	
0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	-	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	35,000,000.00	1 Dokumen	40,423,928.00	
0.00.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Laporan	85,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	115,000,000.00	2 Laporan	120,000,000.00	
0.00.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	
0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan	70,000,000.00	6 Laporan	80,000,000.00	6 Laporan	80,000,000.00	6 Laporan	85,000,000.00	6 Laporan	85,000,000.00	
0.00.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Jenis	120,749,712.00	2 Jenis	145,000,000.00	2 Jenis	145,000,000.00	2 Jenis	155,000,000.00	2 Jenis	160,000,000.00	
0.00.01.1.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	95,749,712.00	2 Paket	125,000,000.00	2 Paket	125,000,000.00	2 Paket	125,000,000.00	2 Paket	130,000,000.00	
0.00.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	
0.00.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9 Jenis	1,435,000,000.00	9 Jenis	1,205,000,000.00	9 Jenis	1,210,000,000.00	9 Jenis	1,285,000,000.00	9 Jenis	1,356,309,723.00	
0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	30,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	
0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	275,000,000.00	5 Paket	250,000,000.00	5 Paket	250,000,000.00	5 Paket	250,000,000.00	5 Paket	250,000,000.00	
0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	
0.00.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	200,000,000.00	2 Paket	150,000,000.00	2 Paket	150,000,000.00	2 Paket	165,000,000.00	2 Paket	171,309,723.00	
0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	
0.00.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	
0.00.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	75,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	
0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	750,000,000.00	95 Laporan	600,000,000.00	100 Laporan	600,000,000.00	125 Laporan	650,000,000.00	125 Laporan	700,000,000.00	
0.00.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10 Dokumen	30,000,000.00	10 Dokumen	35,000,000.00	10 Dokumen	35,000,000.00	10 Dokumen	35,000,000.00	10 Dokumen	40,000,000.00	
0.00.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6 Jenis	204,600,000.00	6 Jenis	408,670,370.00	6 Jenis	400,000,000.00	6 Jenis	410,000,000.00	6 Jenis	425,000,000.00	
0.00.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Paket	-	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	60,000,000.00	1 Paket	65,000,000.00	
0.00.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	37,000,000.00	2 Unit	30,000,000.00	2 Unit	30,000,000.00	2 Unit	30,000,000.00	2 Unit	35,000,000.00	
0.00.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		2 Unit	17,600,000.00	2 Unit	20,000,000.00	2 Unit	20,000,000.00	2 Unit	20,000,000.00	2 Unit	25,000,000.00	
0.00.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	150,000,000.00	8 Unit	208,670,370.00	10 Unit	200,000,000.00	10 Unit	200,000,000.00	10 Unit	200,000,000.00	
0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	-	1 Unit	100,000,000.00	0 Unit	100,000,000.00	0 Unit	100,000,000.00	0 Unit	100,000,000.00	
0.00.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Jenis	860,000,000.00	4 Jenis	805,892,000.00	4 Jenis	884,408,665.00	4 Jenis	950,000,000.00	4 Jenis	990,000,000.00	
0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		250 Laporan	5,000,000.00	250 Laporan	5,000,000.00	300 Laporan	7,500,000.00	350 Laporan	10,000,000.00	350 Laporan	15,000,000.00	
0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	360,000,000.00	2 Laporan	360,000,000.00	2 Laporan	371,908,665.00	2 Laporan	390,000,000.00	2 Laporan	400,000,000.00	
0.00.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	45,000,000.00	1 Laporan	40,892,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	
0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	450,000,000.00	6 Laporan	400,000,000.00	6 Laporan	430,000,000.00	6 Laporan	450,000,000.00	6 Laporan	450,000,000.00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT COME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
0.00.01.1.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>8 Jenis</b>	<b>619,710,000.00</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>622,710,000.00</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>679,710,000.00</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>730,000,000.00</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>745,000,000.00</b>		
0.00.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		6 Unit	218,830,000.00	6 Unit	218,830,000.00	6 Unit	218,830,000.00	6 Unit	230,000,000.00	6 Unit	230,000,000.00		
0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	85,880,000.00	15 Unit	85,880,000.00	15 Unit	85,880,000.00	15 Unit	90,000,000.00	15 Unit	90,000,000.00		
0.00.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	8,000,000.00	5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	25,000,000.00	5 Unit	30,000,000.00		
0.00.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	-	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00		
0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00		
0.00.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00		
0.00.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		0 Unit	-	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	120,000,000.00	1 Unit	130,000,000.00		
8.01.02.	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila</b>		<b>75.00 Persen</b>	<b>2,499,731,795.00</b>	<b>80.00 Persen</b>	<b>2,561,858,064.00</b>	<b>85.00 Persen</b>	<b>2,673,604,217.00</b>	<b>90.00 Persen</b>	<b>2,788,712,887.00</b>	<b>95.00 Persen</b>	<b>2,872,352,662.00</b>		
8.01.02.1.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2,499,731,795.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,561,858,064.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,673,604,217.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,788,712,887.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,872,352,662.00</b>		
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00		
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	2,258,064.00	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00		
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		75 Orang	75,000,000.00	75 Orang	98,000,000.00	75 Orang	100,000,000.00	85 Orang	125,000,000.00	100 Orang	140,000,000.00		
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		40 Orang	50,000,000.00	40 Orang	50,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	75 Orang	100,000,000.00	85 Orang	120,000,000.00		
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	76,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	120,000,000.00		
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	85,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	110,000,000.00		
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila		36 Orang	15,000,000.00	36 Orang	15,000,000.00	36 Orang	15,161,276.00	36 Orang	15,161,276.00	36 Orang	15,500,000.00		
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka		1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,500,000.00		
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Terlaksananya Penugasan Paskibraka		1 Dokumen	382,731,795.00	1 Dokumen	395,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	410,000,000.00		
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00		
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00		
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka		36 Orang	1,850,000,000.00	36 Orang	1,840,000,000.00	36 Orang	1,869,842,941.00	36 Orang	1,919,951,611.00	36 Orang	1,925,852,662.00		
8.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Persentase Pendidikan Politik pada Rader Partai Politik Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</b>		<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>290,809,385.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>393,499,029.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>411,360,337.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>429,759,102.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>443,127,936.00</b>	
			3.31	3.34 Indeks	290,809,385.00	3.37 Indeks	393,499,029.00	3.40 Indeks	411,360,337.00	3.43 Indeks	429,759,102.00	3.46 Indeks	443,127,936.00		

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT COME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.03.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 Persen	290,809,385.00	100 Persen	393,499,029.00	100 Persen	411,360,337.00	100 Persen	429,759,102.00	100 Persen	443,127,936.00	
8 01 03 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	
8 01 03 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	6,999,029.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		150 Orang	138,809,385.00	150 Orang	200,000,000.00	150 Orang	200,000,000.00	150 Orang	212,759,102.00	150 Orang	220,000,000.00	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		50 Orang	50,000,000.00	50 Orang	80,000,000.00	50 Orang	94,360,337.00	60 Orang	100,000,000.00	60 Orang	100,000,000.00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	106,127,936.00	
8.01.04.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif</b>		<b>75.00 Persen</b>	<b>317,553,124.00</b>	<b>80.00 Persen</b>	<b>338,984,051.00</b>	<b>85.00 Persen</b>	<b>354,370,869.00</b>	<b>90.00 Persen</b>	<b>370,220,688.00</b>	<b>95.00 Persen</b>	<b>381,737,416.00</b>	
8.01.04.1.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>317,553,124.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>338,984,051.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>354,370,869.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>370,220,688.00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>381,737,416.00</b>	
8 01 04 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	3,750,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
8 01 04 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	3,234,051.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	85,000,000.00	100 Orang	100,000,000.00	100 Orang	109,370,869.00	100 Orang	125,220,688.00	100 Orang	136,737,416.00	
8 01 04 1.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang	122,553,124.00	50 Orang	132,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT COME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Serngketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Serngketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	
8.01.05.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi</b>	3.13	3.20 Indeks	401,282,286.00	3.23 Indeks	445,000,000.00	3.26 Indeks	452,559,976.00	3.29 Indeks	462,245,976.00	3.32 Indeks	469,283,976.00	
		<b>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya</b>	2.94	3.25 Indeks	14,000,000.00	3.28 Indeks	37,156,920.00	3.31 Indeks	39,000,000.00	3.34 Indeks	39,000,000.00	3.37 Indeks	39,000,000.00	
8.01.05.1.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		100 Persen	415,282,286.00	100 Persen	482,156,920.00	100 Persen	491,559,976.00	100 Persen	501,245,976.00	100 Persen	508,283,976.00	
8 01 05 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	28,156,920.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	
8 01 05 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		150 Orang	246,282,286.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	282,038,000.00	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50 Orang	65,000,000.00	50 Orang	70,000,000.00	50 Orang	77,559,976.00	50 Orang	87,245,976.00	50 Orang	87,245,976.00	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	90,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	
8.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan</b>		75.00 Persen	1,260,504,075.00	80.00 Persen	1,266,860,405.00	85.00 Persen	1,306,842,887.00	90.00 Persen	1,348,028,469.00	95.00 Persen	1,377,954,563.00	
8.01.06.1.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		100 Persen	1,260,504,075.00	100 Persen	1,266,860,405.00	100 Persen	1,306,842,887.00	100 Persen	1,348,028,469.00	100 Persen	1,377,954,563.00	
8 01 06 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	
8 01 06 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	3,070,646.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	
8 01 06 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		150 Orang	150,000,000.00	150 Orang	130,860,405.00	150 Orang	135,000,000.00	175 Orang	145,000,000.00	175 Orang	150,000,000.00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT COME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		150 Orang	116,783,429.00	150 Orang	100,000,000.00	150 Orang	105,000,000.00	150 Orang	110,000,000.00	150 Orang	115,000,000.00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		6 Laporan	250,000,000.00	6 Laporan	80,000,000.00	6 Laporan	85,000,000.00	6 Laporan	90,000,000.00	6 Laporan	95,000,000.00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		1 Dokumen	737,650,000.00	1 Dokumen	950,000,000.00	1 Dokumen	974,842,887.00	1 Dokumen	995,028,469.00	1 Dokumen	1,008,954,563.00	



NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/OUT COME/OUT PUT	BIDANG USUAN /PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUT/PUT	INDIKATOR OUT COME/OUT/PUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Jumlah Laporan		1 Laporan	45,000,000.00	1 Laporan	40,892,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadilakan		6 Laporan	450,000,000.00	6 Laporan	400,000,000.00	6 Laporan	430,000,000.00	6 Laporan	450,000,000.00	6 Laporan	450,000,000.00			
					Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibebaskan Pajak dan Jumlah Mobil yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibebaskan Pajak dan Jumlah Mobil yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya		8 Jenis	619,710,000.00	8 Jenis	622,710,000.00	8 Jenis	679,710,000.00	8 Jenis	730,000,000.00	8 Jenis	745,000,000.00			
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	8,000,000.00	5 Unit	15,000,000.00	5 Unit	25,000,000.00	5 Unit	30,000,000.00			
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya		0 Unit	-	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Diadilakan/Rehabilitasi		1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00	1 Unit	75,000,000.00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadilakan/Rehabilitasi		1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00	1 Unit	175,000,000.00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadilakan/Rehabilitasi		0 Unit	-	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	120,000,000.00	1 Unit	130,000,000.00			
				Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	1. Indeks Kewaganggunaan 2. Indeks Pluralisme	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	75.00 Persen	2,499,731,795.00	80.00 Persen	2,561,858,064.00	85.00 Persen	2,673,604,217.00	90.00 Persen	2,788,712,887.00	95.00 Persen	2,872,352,662.00			
						<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100 Persen	2,499,731,795.00	100 Persen	2,561,858,064.00	100 Persen	2,673,604,217.00	100 Persen	2,788,712,887.00	100 Persen	2,872,352,662.00			
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00			
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	2,258,064.00	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	2,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00			
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	75,000,000.00	75 Orang	98,000,000.00	75 Orang	100,000,000.00	85 Orang	125,000,000.00	100 Orang	140,000,000.00			
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Orang	50,000,000.00	40 Orang	50,000,000.00	50 Orang	75,000,000.00	75 Orang	100,000,000.00	85 Orang	120,000,000.00			
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	76,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	120,000,000.00			
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	85,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	110,000,000.00			
						Peningkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Peserta Purnapaskibraka Duta Pancasila	36 Orang	15,000,000.00	36 Orang	15,000,000.00	36 Orang	15,161,276.00	36 Orang	15,161,276.00	36 Orang	15,500,000.00			
						Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,100,000.00	1 Dokumen	2,500,000.00			
						Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	382,731,795.00	1 Dokumen	395,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	410,000,000.00			
						Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00			

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OIT/ COME/ OIT/ PIT/ COME/ OIT/ PIT	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OIT/ COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OIT/ PIT	INDIKATOR OIT/ COME/ OIT/ PIT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Perencanaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Terbertukunya Pasukan Benar-benar Bangsa		1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00			
					Pembentukan Pasdikbraka			36 Orang	1,850,000,000.00	36 Orang	1,840,000,000.00	36 Orang	1,869,842,941.00	36 Orang	1,919,951,611.00	36 Orang	1,925,852,662.00			
			Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasinya Politik	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</b>	100	100 Persen	290,809,385.00	100 Persen	393,499,029.00	100 Persen	411,360,337.00	100 Persen	429,759,102.00	100 Persen	443,127,936.00			
						<b>Indeks Ketahanan Nasional Gaya Politik</b>	3.31	3.34 Indeks	290,809,385.00	3.37 Indeks	393,499,029.00	3.40 Indeks	411,360,337.00	3.43 Indeks	429,759,102.00	3.46 Indeks	443,127,936.00			
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		100 Persen	290,809,385.00	100 Persen	393,499,029.00	100 Persen	411,360,337.00	100 Persen	429,759,102.00	100 Persen	443,127,936.00			
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Keja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00			
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	6,999,029.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00			
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		150 Orang	138,809,385.00	150 Orang	200,000,000.00	150 Orang	200,000,000.00	150 Orang	212,759,102.00	150 Orang	220,000,000.00			
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		50 Orang	50,000,000.00	50 Orang	80,000,000.00	50 Orang	94,360,337.00	60 Orang	100,000,000.00	60 Orang	100,000,000.00			
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	106,127,936.00			
			Meningkatnya Kebebasan Masyarakat	Indeks Kebebasan Masyarakat	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif</b>	75.00 Persen	317,553,124.00	80.00 Persen	338,984,051.00	85.00 Persen	354,370,869.00	90.00 Persen	370,220,688.00	95.00 Persen	381,737,416.00				
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100 Persen	317,553,124.00	100 Persen	338,984,051.00	100 Persen	354,370,869.00	100 Persen	370,220,688.00	100 Persen	381,737,416.00				
					Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Keja Dibidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	3,750,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00			
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	3,234,051.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00			

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUTPUT	BIDANG USKUS/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUT COME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	85,000,000.00	100 Orang	100,000,000.00	100 Orang	109,370,869.00	100 Orang	125,220,688.00	100 Orang	136,737,416.00	
					Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang	122,553,124.00	50 Orang	132,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	50 Orang	135,000,000.00	
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama		1. Indeks Toleransi 2. Indeks Kerjasama Beragama	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Indeks Ketahanan Nasional</b>	3.13	3.20 Indeks	401,282,286.00	3.23 Indeks	445,000,000.00	3.26 Indeks	452,559,976.00	3.29 Indeks	462,245,976.00	3.32 Indeks	469,283,976.00	
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Indeks Ketahanan Nasional</b>	2.94	3.25 Indeks	14,000,000.00	3.28 Indeks	37,156,920.00	3.31 Indeks	39,000,000.00	3.34 Indeks	39,000,000.00	3.37 Indeks	39,000,000.00	
					<b>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan</b>	<b>Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		100 Persen	415,282,286.00	100 Persen	482,156,920.00	100 Persen	491,559,976.00	100 Persen	501,245,976.00	100 Persen	508,283,976.00	
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	28,156,920.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan		1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00	
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan		150 Orang	246,282,286.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	275,000,000.00	150 Orang	282,038,000.00	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan		50 Orang	65,000,000.00	50 Orang	70,000,000.00	50 Orang	77,559,976.00	50 Orang	87,245,976.00	50 Orang	87,245,976.00	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan		1 Laporan	90,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan</b>		75.00 Persen	1,260,504,075.00	80.00 Persen	1,266,860,405.00	85.00 Persen	1,306,842,887.00	90.00 Persen	1,348,028,469.00	95.00 Persen	1,377,954,563.00	
					<b>Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		100 Persen	1,260,504,075.00	100 Persen	1,266,860,405.00	100 Persen	1,306,842,887.00	100 Persen	1,348,028,469.00	100 Persen	1,377,954,563.00	
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Dokumen	3,070,646.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,500,000.00	

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	BIDANG USUSAN / PROGRAM /OUT COME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUT PUT	INDIKATOR OUT COME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		150 Orang	150,000,000.00	150 Orang	130,860,405.00	150 Orang	135,000,000.00	175 Orang	145,000,000.00	175 Orang	150,000,000.00			
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		150 Orang	116,783,429.00	150 Orang	100,000,000.00	150 Orang	105,000,000.00	150 Orang	110,000,000.00	150 Orang	115,000,000.00			
					Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		6 Laporan	250,000,000.00	6 Laporan	80,000,000.00	6 Laporan	85,000,000.00	6 Laporan	90,000,000.00	6 Laporan	95,000,000.00			
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		1 Dokumen	737,650,000.00	1 Dokumen	950,000,000.00	1 Dokumen	974,842,887.00	1 Dokumen	995,028,469.00	1 Dokumen	1,008,954,563.00			

**Tabel 4.4a**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUT COME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>- Pembinaan Kepemudaan dan Keluarga Sejahtera dalam pengurangan penyakit masyarakat (narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya)</p> <p>- Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB</p>
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>	Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKDM dan Forkopimda serta tim terpadu penanganan konflik sosial

**Tabel 4.4b**  
**URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITYS PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2029)**

No	PROGRAM PRIORITYS	OUT COME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Meningkatnya Etika dan Budaya Politik</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi pelaksanaan penggunaan hak pilih kepada Penyandang Disabilitas dalam partisipasi PEMILU
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum terkait (partisipasi sebagai, pemilih, penyelenggaraan PEMILU, dan sarana dan prasarana penyelenggaraan PEMILU)
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi kepartisipasian penyandang disabilitas duduk dalam lembaga legislatif.

**Tabel 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Indeks Harmoni Religius	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Indeks Toleransi	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Indeks Kerjasama	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Indeks Kewarganegaraan	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Indeks Pluralisme	Indeks	0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	70.05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	77.06	77.36	77.66	77.96	78.26	78.56	78.86	
	Indeks Kebebasan	Indeks	82.71	83.01	83.31	83.61	83.91	84.21	84.51	
	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	74.17	74.47	74.77	75.07	75.37	75.67	75.97	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69.45	70.25	70.75	71.25	71.75	72.25	72.75	

**Tabel 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8.01- KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	positif	%	75.00	75.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	positif	Indeks	3.31	3.31	3.34	3.37	3.40	3.43	3.46	
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	positif	Persentase	75.00	75.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	
6	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	positif	Indeks	3.13	3.13	3.20	3.23	3.26	3.29	3.32	
7	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	positif	Indeks	2.94	3.25	3.25	3.28	3.31	3.34	3.37	
8	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	positif	Persentase	75.00	75.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	

Berdasarkan pedoman umum LPPD 2024 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Pemerintahan Umum tidak menjadi kewajiban Urusan Pemerintah Daerah

**BAB V**  
**PENUTUP**

**RENSTRA**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami  
[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)

**"Riau Rumah Rumpun Melayu,  
Merawat Tuah Menjaga Marwah,  
Takkan Melayu Hilang di Bumi"**

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang memuat program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dalam mencapai tujuan dan sasaran disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025–2029 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Riau pada umumnya.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2025–2029. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang serta akan melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian secara responsif gender.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Kedepannya, diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau secara umum.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



**BOBY RACHMAT, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19830516 200112 1 002



**RENCANA STRATEGIS**

**RENSTRA  
2025-2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami

[www.kesbangpol.riau.go.id](http://www.kesbangpol.riau.go.id)



## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 276/III/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR RIAU,**

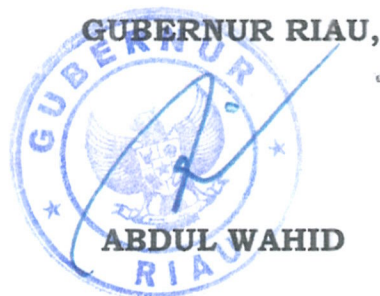
- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator;
  - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 MARET 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 276/III/2025  
 TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
 TAHUN 2025 – 2029

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU  
TAHUN 2025 – 2029**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.			
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		V	Untuk menambahkan dasar hukum 1. Peraturan Gubernur Nomor 5 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 2. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 3. Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG dalam Pembangunan Provinsi Riau
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029		V	Menambahkan  Maksud Mewujudkan respon perencanaan responsive1 daerah yang

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					<p>2esponsive gender dan inklusif.</p> <p>Tujuan Merumuskan perencanaan 2esponsive2 daerah yang 2esponsive gender dan inklusif.</p>
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.			
<b>2</b>	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>				
	<b>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<p>Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.</p> <p>Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).</p>		V	<p>Menyajikan data SDM terkait ASN Disabilitas</p> <p>Menyajikan data sarana prasarana pendukung inklusi dan gender</p> <p>Menyajikan data Terpilah pada Kinerja Pelayanan terkait dengan Gambaran Indeks Demokrasi Indonesia spesifik menjelaskan bagaimana capaian Aspek Kesetaraan pada Indikator kesetaraan Gender;</p> <p>Data kesenjangan Gender terkait dengan Persentase perempuan dalam pemilihan langsung</p>
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Sumber daya Perangkat Daerah			V	Mohon dilengkapi dengan data sarana dan prasarana di Badan Kesbangpol yang terkait responsif gender
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)				
	Kelompok sasaran layanan				
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)				
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)				
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)				
	<b>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>				Agar dilengkapi narasi terkait permasalahan Menyusun strategi afirmasi dan dukungan nyata untuk perempuan calon legislatif dan kepala daerah(kuota,pembiayaan kampanye,pelatihan)

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya</p>		V	Mohon didiskusikan terkait permasalahan dan isu gender yang terkait di Badan Kesbangpol
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.			
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>				
		Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	<p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. Kalimat kondisi;</p> <p>b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Disusun dengan 5ahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p>			
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . ( <i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i> )			
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.		V	Dilengkapi dengan strategi yang sesuai dengan rekomendasi dalam sub bab isu strategis dan permasalahan tsb
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD			
<b>4</b>	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.			
	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif		V	Disusun analisis gender pada sub kegiatan yang ditandai sebagai kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan GAP/GBS/GAB (ditandai
		Perangkat Daerah memperhatikan:			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
		<p>1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. <i>(dengan menggunakan nomenklatur <b>Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..</b>)</i></p>			dengan ARG utk sub kegiatan tsb)
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif			
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir <b>point 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</b></p> <p><i>- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</i></p> <p><i>- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra</i></p>		V	<p>Menambahkan Program Priroitas Kemiskinan dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 pada uraian sub kegiatan dalam rangka mendkung program prioritas pembangunan daerah Tabel terlampir</p> <p>di Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung pencapaian kesetaraan gender pada peningkatan Partisipasi perempuan di Politik dan Peningkatan Partisipasi pemilih perempuan lalu Disusun analisis gender pada sub kegiatan yang ditandai sebagai kegiatan yang responsif gender dengan</p>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					menggunakan GAP/GBS/GAB
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin <b>7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)</b> <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i>			
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin <b>8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6)</b> <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK</i>			
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	<b>(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)</b>			
<b>5</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			

**Lampiran 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029)**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Meningkatnya Etika dan Budaya Politik</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi pelaksanaan penggunaan hak pilih kepada Penyandang Disabilitas dalam partisipasi PEMILU
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum terkait (partisipasi sebagai, pemilih, penyelenggaraan PEMILU, dan sarana dan prasarna penyelenggaraan PEMILU)

No	PROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi kepartisipasian penyandang disabilitas duduk dalam lembaga legislatif.

Pekanbaru, Oktober 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**  
**SEKRETARIS**



SRI PETRI HARYANTI, S.Pd  
NIP. 19690321 199802 2 001

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM**



RIZKY MUHARI YAFFIS, S.STP., M.Si  
NIP. 19920707 201406 1 001

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA**



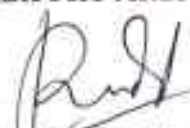
MURSALIM, S.T  
NIP. 19791008 200902 1 003

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**BAPPEDA PROVINSI RIAU**



RAJA JUARISMAN, S.T., M.Si  
NIP. 19770611 200012 1 002

**PERENCANA AHLI MADYA**  
**BAPPEDA PROVINSI RIAU**



RUDI HENDRA GUNAWAN, S.Kom., M.Si.  
NIP. 19701224 199803 1 004

**PERENCANA AHLI MUDA**  
**BAPPEDA PROVINSI RIAU**



ARI DIANUARI, S.T  
NIP. 19810103 200902 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

## CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Akhmad Fadli Lubis/ September 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto / September 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/ September 2025
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>		
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>		
<b>DATA UMUM</b>		
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM.		
Sasaran : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama.</li><li>2. Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan.</li><li>3. Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat.</li><li>4. Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi</li><li>5. Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat</li><li>6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</li></ol>		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.		
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.		
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.		

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

**Rekomendasi:**

Disarankan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Riau

**BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19830516 200112 1 002

Supervisor/Pengendali Teknis

**RONI COKRO SUBAGIO, SE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196712051998031003

## KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APP	
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN	
									YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.06.01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Ya	Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Sudah Selaras Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	
2					1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Ya		
3					1.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Ya		
4					1.06.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Ya		
5					1.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Ya		
6					1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Ya
7					1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Ya
8						1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Ya
9					1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Ya
10						1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Ya
11					1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Ya
12						1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Ya
13						1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Ya
14						1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Ya
15						1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket		Ya
16						1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Ya
17						1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Ya
18						1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Ya
19					1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.1.07.0001 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Ya
20						1.06.01.1.07.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Ya
21						1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Ya
22						1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		Ya
23						1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Ya
24						1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Ya
25						1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Ya

26					1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Ya
27				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Ya
28					1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Ya
29					1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Ya
30					1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Ya
31					1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
32				1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Ya
33				1.06.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Ya
34				1.06.01.1.09.0008 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Ya
35				1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya
36				1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya
37				1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Ya
38				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Ya
39				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	Ya
40					1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	Ya
41					1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Ya
42					1.06.02.1.02.0010 Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Ya
45					1.06.02.1.02.0013 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang	Ya
46					1.06.02.1.02.0014 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	Ya
47					1.06.02.1.02.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	Ya
48					1.06.02.1.02.0016 Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Gradiasi	Lembaga	Ya
49					1.06.02.1.02.0017 Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	Ya
50					1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	Ya
51				1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	Ya	

52		- Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAWAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	Ya		
53					1.06.07.1.01.0004 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	Ya		
54					1.06.07.1.01.0005 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	Ya		
55		- Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1.08.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.08.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.08.03.1.01.0003 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Ya		
56					1.08.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
57					1.08.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
58					1.08.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
59					1.08.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
60					1.08.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
61					1.08.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di dalam Panti	1.08.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
62						1.08.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
63						1.08.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
64						1.08.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
65						1.08.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
66						1.08.04.1.01.0017 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
67						1.08.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar	Dokumen	Ya	
68						1.08.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di dalam Panti	1.08.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
69							1.08.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
70							1.08.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
71					1.08.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
72	1.08.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	Ya						
73	1.08.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	Ya						
74	1.08.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya						
75	1.08.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya						

76	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif				1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
77					1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
78					1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	Ya		
79					1.06.04.1.02.0022 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
80					1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
81					1.09.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
82					1.09.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
83					1.09.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
84					1.09.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
85					1.09.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	Ya		
86	- Meningkatkan rehabilitasi sosial	1.08.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.08.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.08.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
87				1.08.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
88				1.08.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
89				1.08.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
90				1.08.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
91				1.08.04.1.03.0015 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
92				1.08.04.1.03.0016 Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya			
93				1.08.04.1.03.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	Ya			
94				Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
95							1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
96	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang				Ya			
97	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang				Ya			
98	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang				Ya			
99	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang				Ya			
100	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang				Ya			

101				1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
102				1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
103				1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarang di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	Ya	
104				1.06.04.1.04.0013 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
105				1.06.04.1.04.0015 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
106			1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
107				1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
108				1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
109				1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
110				1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
111				1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
112				1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
113				1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
114				1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	Ya	
115				1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	Ya	
116				1.06.04.1.05.0013 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
117				1.06.04.1.05.0014 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
118				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
119					1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
120			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
121				1.06.05.1.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
122	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	Ya
123					1.06.05.1.02.0009 Fasilitas pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	Ya
124					1.06.05.1.02.0010 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	Ya

125					1.06.05.1.02.0011 Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Orang	Ya	
126					1.06.05.1.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
127					1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
128					1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
129					1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
130					1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
131					1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	Ya	
132					1.06.06.1.01.0016 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	Ya	
133					1.06.06.1.01.0017 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	Ya	
134					1.06.06.1.01.0018 Sosialisasi dan Edukasi penganggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penganggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Ya	
135					1.06.06.1.01.0019 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penganggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penganggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Ya	
136					1.06.06.1.01.0020 Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	Ya	
137					1.06.06.1.01.0021 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	Ya	
138					1.06.06.1.01.0022 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	Ya	
139					1.06.06.1.01.0023 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	Ya	
140					1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
141						1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
142						1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
143						1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	Ya
144						1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	Ya
145	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya perencanaan dan jaminan sosial	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0009 Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	Ya	
146						1.06.05.1.02.0010 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	Ya
147						1.06.05.1.02.0011 Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Orang	Ya
148						1.06.05.1.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang	Ya

## KESELARASAN INDIKATOR, KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	HASIL REVIU APIP	
					KESELARASAN	
					YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	Indeks Harmoni Religius	Indeks	IKD	IKD	Ya	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Sudah Selaras Dengan Bidang Urusan Pada Perangkat Daerah
2	Indeks Kerjasama	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
3	Indeks Kebebasan	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
4	Indeks Toleransi	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
5	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	IKU	SASARAN	Ya	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	Ya	
7	Indeks Pluralisme	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
8	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
9	Indeks Kewarganegaraan	Indeks	IKU	SASARAN	Ya	
10	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	IKU	TUJUAN	Ya	
11	Indeks Harmoni Religius	Indeks	IKU	TUJUAN	Ya	
12	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	IKD	IKD	Ya	
13	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	IKU	TUJUAN	Ya	

**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS KEPADA RP JMD  
DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP	
				KESELARASAN	
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	Program Prioritas Pada RP JMD <b>Sudah Konsisten</b> Dengan Program Pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
2	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	

**KONSISTEN DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RP JMD  
DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH**

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP	
				KESELARASAN	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	Program Perangkat Daerah Pada RP JMD <b>Sudah Konsisten</b> Dengan Program Pada Rancangan Akhir Renstra Pada Perangkat Daerah
2	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN(Non Prioritas)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	
3	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK(Non Prioritas)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	
4	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN(Non Prioritas)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	
5	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Prioritas)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	
6	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Prioritas)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ya	

**KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA**

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI	
									T0	T1	T2	T3	T4			T5
1	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kerjasama	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	Ya	Pendapan Target IKU Sudah Selaras Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
2	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kebebasan	Indeks	86.88	90.65	82.71	9124103695532260%	79.39	79.69	79.99	80.29	80.59	80.89	81.19	Ya	
3	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Toleransi	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	Ya	
4	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	75	76	76	10000%	70.05	70.05	70.10	70.15	70.20	70.25	70.30	Ya	
5	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	NaN%	89.45	70.25	70.75	71.25	71.75	72.25	72.75	Ya	
6	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Pluralisme	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	Ya	
7	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	89.47	65.08	74.17	11396742470805100%	66.30	66.60	66.90	67.20	67.50	67.80	68.10	Ya	
8	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kewarganegaraan	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	Ya	
9	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	77.59	81.46	77.06	9459857598821500%	75.55	75.85	76.15	76.45	76.75	77.05	77.35	Ya	
10	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Harmoni Religius	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	Ya	
11	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	Ya	

## KESELARASAN PENETAPAN TARGET IKD DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DENGAN HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU		
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					KESELARASAN		
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI
1	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Harmoni Religius	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	6.5	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7.0	Ya	Penetapan Target IKD Sudah Selaras Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Dengan Hasil Capaian Periode Sebelumnya
2	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	N/A	N/A	N/A	NaN%	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	Ya	

KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUBKEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU								
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	KESELARASAN			
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						YA / TIDAK	CATATAN / REKOMENDASI		
1				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka		0	1		Ya	Penetapan Target Sub Kegiatan Belum Selaras Dengan Data Statistik Sektoral Daerah Agar Menyajikan Satuan Dan Data Capaian Tahun 2024 Pada DSSD		
2			1				1	1	1	1	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1	1		Ya					
3			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1	1			Ya	
4									1	1	1	1	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1	1		Ya			
5			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		75	75	75	85	100	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		350	1380			Ya
6			Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		40	40	50	75	85	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		350	100			Ya
7			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan		1	1	1	1	1	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	1			Ya
8			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1	1			Ya

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	36	36	36	36	36	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	Ya
								Purnapaskibraka	0	36	Ya
								Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	Ya
								Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	Ya
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1	1	1	1	1	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0	0	Ya
								Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0	0	Ya
								Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	18	Ya
								Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	36	Ya
								Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0	0	Ya
								Training of Trainer Kepamongan	0	0	Ya
								Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	0	Ya
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1	1	1	1	1	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	36	Ya
								Pamong/Pengasuh	0	8	Ya
								Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	17	Ya
								Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	1	Ya
								Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	1	Ya
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	1	Ya								
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	1	1	1	1	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	36	Ya
								Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	36	
								Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	
								Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	350	1386	
								Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	350	1386	

31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54

KESATUAN  
BANGSA DAN  
POLITIK

										Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6	4		
										Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahragaj) Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Training of Trainer Kepamongan	0	0		
										Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0		
										Anggota Paskibraka	0	36		
										Calon Paskibraka	0	48		
										Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	0	36		
										Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	0	48		
										Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	18		
										Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	0	3		
										Narasumber atau Petatih dalam Pembentukan Paskibraka	0	10		
										Pamong/Pengasuh	0	8		
										Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	0	69		
										Pelatih Paskibraka	0	10		
										Peserta Calon Paskibraka	0	48		
										Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	36		
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	1	1	1	1					
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	36	36	36	36	36					

55																				Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi		0	69																					
56																				Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka		0	1																					
57																				Transportasi pada pembentukan paskibraka		0	1																					
58																				Paskibraka		0	36																					
59																				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1						0	1								
60																				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1							0	1							
61																				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		150	150	150	150	150									365	1235				
62																				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		50	50	50	60	60											115	54				
63																				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1											1	1			
64																				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1												1	1		

65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	100	100	100	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	152	100		
66			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	270	438		
67			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1		
68	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1		
69			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1		
70			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	150	150	150	150	150	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	1460		
71			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2949	225		
72			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1		

73			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1		
74	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1		
77			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	6	6	6	6	6	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	2		
78			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1	1		
79											Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1		

**METADATA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI RIAU**

**1. Tingkat Harmoni Sosial**

**Institusi Penghasil :**

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Defenisi**

Indeks Harmoni Sosial adalah kondisi keseimbangan, keselarasan, dan kerja sama damai antarindividu atau kelompok yang beragam, ditandai dengan solidaritas, toleransi, serta minimnya konflik. Ini merupakan keadaan di mana masyarakat hidup serasi, saling menghormati perbedaan, dan mematuhi norma bersama untuk mencapai tujuan kolektif.

**Interpretasi**

Interpretasi Tingkat Harmoni Sosial adalah pengukuran dan penilaian kondisi stabilitas, kohesi, dan kedamaian antaranggota masyarakat yang beragam, sering kali diwujudkan melalui indeks (IHaI). Ini menunjukkan sejauh mana masyarakat hidup sejalan, saling menghargai, dan bekerja sama tanpa konflik yang merusak, serta sering dikaitkan dengan kuatnya modal sosial.

Aspek Penting Interpretasi Harmoni Sosial:

- Indikator Stabilitas: Mengukur tingkat keselarasan, keadilan, dan inklusivitas, di mana konflik jarang terjadi dan diselesaikan secara konstruktif.
- Faktor Pembentuk: Didorong oleh toleransi, solidaritas, dan pemahaman perbedaan yang tinggi, baik dalam hal budaya maupun sosial.
- Fungsi Pengukuran: Berfungsi untuk memantau perubahan kondisi sosial (peningkatan atau penurunan) serta mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi untuk mencegah potensi konflik.

- Teori Dasar: Didasarkan pada integrasi sosial (Durkheim), keseimbangan sistem (Parsons), dan komunikasi yang inklusif (Habermas).

### **Metode/Rumus Perhitungan**

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\text{IHaI} = \sum(\text{ki} \cdot \text{Xi})$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.
- Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **2. Tingkat Harmoni Religius**

**Institusi Penghasil** :

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

### **Defenisi**

Tingkat harmoni religius adalah ukuran kualitas hubungan, kerukunan, dan keselarasan sosial antarumat beragama yang ditandai dengan toleransi, sikap damai, saling menghargai, serta minimnya konflik. Ini menggambarkan keseimbangan dan

kemampuan masyarakat mengelola keberagaman untuk menciptakan stabilitas dan kehidupan berdampingan yang rukun.

### **Interpretasi**

Interpretasi tingkat harmoni religius adalah pengukuran dan evaluasi mengenai sejauh mana tingkat keselarasan, kerukunan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama yang terwujud di tengah masyarakat yang plural.

Interpretasi ini mencakup penilaian terhadap toleransi antarumat beragama, kebebasan menjalankan ibadah, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan keyakinan agar tidak menjadi konflik sosial.

Berikut adalah poin-poin penting dalam interpretasi tingkat harmoni religius:

- Definisi Operasional: Kondisi di mana individu dan kelompok agama hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan mampu bekerja sama dalam keragaman.
- Indikator Utama (Moderasi Beragama): Tingkat harmoni diinterpretasikan melalui empat indikator: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) penerimaan terhadap tradisi lokal.
- Indeks Harmoni Indonesia (IHaI): Di Indonesia, tingkat harmoni religius diukur menggunakan instrumen seperti IHaI, yang merefleksikan kualitas hidup, stabilitas, dan kerukunan beragama di suatu wilayah.
- Ciri Harmoni Tinggi: Ditandai dengan tingginya rasa toleransi, minimnya ketegangan sosial, adanya dialog terbuka, serta aksi gotong royong antarumat beragama.
- Bukan Sekadar Hidup Berdampingan: Interpretasi modern menekankan bahwa harmoni bukan hanya tidak ada konflik, melainkan adanya interaksi aktif dan kerja sama (persaudaraan) antarumat beragama.

## **Metode/Rumus Perhitungan**

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\text{IHaI} = \sum(k_i \cdot X_i)$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel ( $X_i$ ) dan bobot ( $k_i$ ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- $k_i$  : Bobot yang diberikan pada setiap variabel  $X_i$ .
- $X_i$  : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

### **3. Tingkat Perkembangan Demokrasi Indonesia**

**Institusi Penghasil** : Badan Pusat Statistik

#### **Defenisi**

Tingkat perkembangan demokrasi Indonesia adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik prinsip dan praktik demokrasi dijalankan di Indonesia. IDI merupakan indikator komposit yang mengukur perkembangan demokrasi di tingkat nasional dan provinsi.

#### **Interpretasi**

Interpretasi terhadap tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan tren yang beragam, di mana indikator dari lembaga nasional dan internasional menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cenderung stagnan atau mengalami kemunduran dalam beberapa

tahun terakhir. Berbagai laporan mencatat adanya penurunan skor dalam indeks demokrasi, meskipun masih dalam kategori 'demokrasi cacat' (*flawed democracy*).

### **Metode/Rumus Perhitungan**

Skor IDI per Provinsi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan :

- $X_{ijk}$  : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke  $i$ , aspek ke  $j$ , indikator ke  $k$ .
- $X_{ideal}$  : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator  $X_{ijk}$
- $X_{terburuk}$  : tingkat capaian terburuk dari indikator  $X_{ijk}$

Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$ ;

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : 2010-2024

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

#### **4. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

**Institusi Penghasil**: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

##### **Defenisi**

Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

## **Interpretasi**

Interpretasi tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menilai seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Tingkat ini mencakup kategori seperti "Sangat Baik" (efisien, sistem manajemen andal, pengukuran sampai level eselon 3), "Baik" (perbaikan unit perlu dilakukan, komitmen ada), "Cukup" (perlu banyak perbaikan, terutama pada unit kerja), "Kurang" (sistem tidak dapat diandalkan, perlu perbaikan mendasar), dan "Sangat Kurang" (sistem sama sekali tidak dapat diandalkan).

## **Metode/Rumus Perhitungan**

Formulasi perhitungan tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tidak menggunakan rumus matematis tunggal yang sederhana, melainkan melalui evaluasi komprehensif terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.

**Ukuran/Satuan** : Nilai

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **5. Tingkat Kewarganegaraan**

**Institusi Penghasil** : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

### **Defenisi**

Tingkat Kewarganegaraan adalah juga dapat diartikan sebagai pengembangan kemampuan individu dari sekadar menjadi warga negara pasif menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung

jawab (agen perubahan) dan tingkat kewarganegaraan mencerminkan seberapa kuat ikatan hukum, seberapa tinggi tingkat kesadaran, dan seberapa aktif peran seseorang dalam komunitas negaranya.

### **Interpretasi**

Interpretasi tingkat kewarganegaraan adalah kategorisasi atau pengukuran seberapa tinggi tingkat keterlibatan, pemahaman, kompetensi, dan kesadaran seseorang sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

### **Metode/Rumus Perhitungan**

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\mathbf{IHaI} = \sum(\mathbf{k_i \cdot X_i})$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel ( $X_i$ ) dan bobot ( $k_i$ ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- $k_i$  : Bobot yang diberikan pada setiap variabel  $X_i$ .
- $X_i$  : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **6. Tingkat Toleransi Kerukunan Umat Beragama**

**Institusi Penghasil** : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

## **Defenisi**

Tingkat toleransi dalam kerukunan umat beragama adalah derajat sikap saling menghormati, memahami, menerima, dan menghargai perbedaan keyakinan antarindividu atau kelompok tanpa diskriminasi. Ini merupakan kondisi di mana perbedaan agama tidak menimbulkan konflik, melainkan diwujudkan dalam kerja sama sosial dan penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.

## **Interpretasi**

Interpretasi tingkat Toleransi adalah analisis mengenai seberapa besar batas kepatuhan, penerimaan, atau kelonggaran yang diberikan terhadap suatu standar, perbedaan, atau variasi tertentu.

Dalam berbagai konteks, interpretasinya adalah sebagai berikut:

- Sikap Sosial/Beragama: Interpretasi tingkat toleransi menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok menghargai perbedaan, menerima pandangan yang berbeda, dan menahan diri dari perilaku diskriminatif. Tingkat yang tinggi berarti masyarakat mampu menerima perbedaan (agama, etnis, pendapat) dengan baik.
- Data/Kualitas (Statistik): Ini merujuk pada rentang perilaku atau hasil yang "cukup dekat" dengan standar, sehingga masih dianggap normal dan dapat diterima meskipun ada sedikit penyimpangan.
- Analisis Teknis/Industri: Interpretasi ini melibatkan perhitungan variasi yang diizinkan (batas atas dan bawah) dalam desain produk untuk memastikan produk tersebut berfungsi dengan baik tanpa biaya produksi yang berlebihan.

## **Metode/Rumus Perhitungan**

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\text{IHaI} = \sum(\text{ki} \cdot \text{Xi})$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.
- Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **7. Tingkat Pluralisme**

**Institusi Penghasil** : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

### **Defenisi**

Tingkat pluralisme adalah ukuran sejauh mana suatu masyarakat mengakui, menghargai, dan berinteraksi secara aktif di tengah keragaman identitas sosial, budaya, agama, etnis, dan politik. Ini bukan sekadar koeksistensi pasif, melainkan pengakuan terhadap hak kelompok berbeda untuk hidup berdampingan secara setara, toleran, dan inklusif.

## **Interpretasi**

Interpretasi tingkat pluralisme merujuk pada pemahaman mengenai seberapa dalam, luas, dan intensif pengakuan serta interaksi antarberbagai kelompok yang berbeda (agama, budaya, sosial, politik) dalam suatu masyarakat. Tingkat pluralisme tidak hanya sekadar adanya kemajemukan (pluralitas), tetapi seberapa aktif keberagaman tersebut diterima, dihormati, dan difasilitasi dalam kehidupan sehari-hari.

## **Metode/Rumus Perhitungan**

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\mathbf{IHaI} = \sum(\mathbf{k_i \cdot X_i})$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel ( $X_i$ ) dan bobot ( $k_i$ ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- $k_i$  : Bobot yang diberikan pada setiap variabel  $X_i$ .
- $X_i$  : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **8. Tingkat Kerjasama**

**Institusi Penghasil** : Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

## **Defenisi**

Tingkat kerjasama kerukunan Umat beragama adalah derajat keterlibatan aktif dan sinergi antara pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan sosial, yang dilandasi toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama (seperti pembangunan atau kesejahteraan) tanpa mencampuradukkan ajaran akidah masing-masing.

## **Interpretasi**

Interpretasi tingkat kerjasama kerukunan Umat beragama adalah indikator tingkat toleransi, kesetaraan, dan keaktifan umat beragama dalam bekerjasama (gotong royong) untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai Metode/Rumus Perhitungan.

Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu :

$$\mathbf{IHaI} = \sum(\mathbf{k_i \cdot X_i})$$

Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel ( $X_i$ ) dan bobot ( $k_i$ ) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.

Dalam konteks rumus ini:

- IHaI : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
- $\sum$  : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- $k_i$  : Bobot yang diberikan pada setiap variabel  $X_i$ .
- $X_i$  : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Website Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## 9. **Tingkat Fasilitasi Penanganan Konflik**

**Institusi Penghasil** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Polda Riau.

### **Defenisi**

Tingkat penurunan konflik sosial di masyarakat mengacu pada berkurangnya intensitas, frekuensi, dan dampak negatif dari perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat dalam periode waktu tertentu. Konsep ini sering dikaitkan dengan proses resolusi konflik dan transformasi konflik, yang bertujuan untuk mencapai kondisi damai dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis.

### **Interpretasi**

Interpretasi tingkat penurunan konflik sosial di masyarakat melibatkan analisis terhadap berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan berkurangnya ketegangan, permusuhan, dan perilaku konflik di antara para pihak yang terlibat. Penurunan konflik dapat diukur dan diinterpretasikan melalui beberapa pendekatan.

### **Metode/Rumus Perhitungan**

Untuk mengukur tingkat Fasilitasi Konflik di Provinsi Riau :

$$\frac{\Sigma \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun } (n)}{\Sigma \text{Jumlah Konflik Sosial tahun } (n)} \times 100$$

Penjelasan :

(n) : Tahun yang akan dinilai

**Ukuran/Satuan** : Persentase (%)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## 10. Tingkat Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi

**Institusi Penghasil** : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

### **Defenisi**

Tingkat kebebasan masyarakat berdemokrasi merujuk pada sejauh mana hak-hak dasar dan kebebasan sipil warga negara dijamin, dilindungi, dan dapat diwujudkan dalam suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Kebebasan ini dijalankan secara bertanggung jawab melalui aturan dan lembaga yang sah.

### **Interpretasi**

Interpretasi tingkat kebebasan masyarakat berdemokrasi di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek kebebasan sipil, meskipun secara keseluruhan indeks demokrasi berada dalam kategori "demokrasi yang cacat" (flawed democracy) atau "sedang". Penilaian ini didasarkan pada berbagai laporan indeks demokrasi terbaru.

### **Metode/Rumus Perhitungan**

IDI Provinsi Riau =  $\sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$

IDI : Indek Demokrasi Indonesia

P<sub>i</sub> : Nilai Penimbang dari Aspek ke i

I (A<sub>i</sub>) : Indeks Aspek ke i

I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesenjangan

$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$

I (A<sub>i</sub>) : Indeks Aspek ke i

P<sub>ij</sub> : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i

I (A<sub>ij</sub>) : Indeks Variabel ke J dari aspek ke i

AHP : Analytical Hierarchy Procedur

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

## **11. Tingkat Kapasitas Lembaga Demokrasi**

**Institusi Penghasil** : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

### **Defenisi**

"Tingkat Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat" adalah sebuah deskripsi tentang kondisi ideal dalam sistem demokrasi yang melibatkan dua komponen utama yang saling terkait dan memperkuat : kinerja institusi demokrasi yang optimal dan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik.

## **Interpretasi**

Interpretasi hubungan antara tingkat efektivitas fungsi kapasitas lembaga demokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah adanya hubungan timbal balik yang positif :

- Lembaga demokrasi yang efektif mendorong partisipasi politik yang tinggi.
- Partisipasi politik yang tinggi memperkuat efektivitas lembaga demokrasi.

Berikut rincian interpretasinya :

### 1. Lembaga Demokrasi yang Efektif Meningkatkan Partisipasi

Ketika lembaga-lembaga demokrasi (seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan legislatif) berfungsi secara efektif, transparan, dan akuntabel, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi.

- Meningkatkan Kepercayaan (Trust) : Masyarakat cenderung berpartisipasi jika mereka percaya bahwa suara dan keterlibatan mereka akan didengar dan membawa perubahan nyata.
- Menjamin Keterwakilan : Lembaga yang efektif memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Adanya ruang bagi partisipasi masyarakat (melalui rapat dengar pendapat, forum publik, dll.) membuat warga merasa memiliki andil dalam pemerintahan.
- Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi : Efektivitas dalam pengawasan publik dan penegakan hukum (misalnya, terhadap politik uang) mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya memupuk keyakinan masyarakat terhadap sistem.

### 2. Partisipasi Politik yang Tinggi Memperkuat Efektivitas Lembaga

Partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti dalam pemilihan umum, memberikan legitimasi yang kuat kepada para pemimpin dan institusi yang terpilih.

- Legitimasi Pemerintahan : Tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilu memperkuat dasar kekuasaan pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat.
- Mekanisme Kontrol : Partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui pengawasan Pemilu dan keterlibatan dalam organisasi sipil, berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan lembaga demokrasi, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
- Implementasi Nilai Substantif : Partisipasi yang baik memastikan nilai-nilai substansial demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan akses yang sama terhadap hak-hak dasar, dapat terimplementasikan dengan baik, bukan sekadar prosedural belaka.

### **Metode/Rumus Perhitungan**

IDI Provinsi Riau =  $\sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$

IDI : Indek Demokrasi Indonesia

$P_i$  : Nilai Penimbang dari Aspek ke  $i$

$I(A_i)$  : Indeks Aspek ke  $i$

$I$  : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan

$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$

$I(A_i)$  : Indeks Aspek ke  $i$

$P_{ij}$  : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke  $j$  dari aspek ke  $i$

$I(A_{ij})$  : Indeks Variabel ke  $J$  dari aspek ke  $i$

AHP : Analytical Hierarchy Procedur

**Ukuran/Satuan** : Indeks (nilai)

**Judul Publikasi/Sumber Data** :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : Tahunan

**Level Estimasi** : Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

**Form Penjelajaran**

*(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)*

**PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelajaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain :

**1. PERIODESASI**

<b>No</b>	<b>Periodesasi RPJMN</b>	<b>Periodesasi Renstra PD</b>
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b> Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029



**3. SUBKEGIATAN YANG Mendukung PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)**

<b>NO</b>	<b>Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

**Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN**

**4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Demokrasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Harmoni Sosial</li> <li>- Indeks Harmoni Religius</li> <li>- Indeks Demokrasi Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi</li> <li>- Indeks Kebebasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</li> <li>- Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500	800	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					- Indeks Harmoni Religius			6,5	6,9	
					- Indeks Demokrasi Indonesia			77,36	78,56	
						• Indeks Kewarganegaraan		6,5	6,9	
				• Indeks Pluralisme			6,5	6,9		
						Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai Pancasila	75%	90%		
2.	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kcsatuan NKRI Bagi Aparatur	180	180	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				- Indeks Harmoni Religius			6,5	6,9		
				- Indeks Demokrasi Indonesia			77,36	78,56		

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kewarganegaraan</li> <li>• Indeks Pluralisme</li> </ul>		6,5	6,9	
							Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	75%	90%	
3.	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku, Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	5	38	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial - Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Toleransi</li> <li>• Indeks Kerjasama</li> </ul>		6,5	6,9	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi</li> <li>• Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya</li> </ul>		3,29	3,34	
								3,20	3,25	
4.	Fasilitasi Penguatan Karakter dan	38	38	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa				- Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5  77,36	6,9  78,56	Bangsa dan Politik
						Indeks Kewarganegar aan dan Indeks Pluralisme		6,5  6,5	6,9  6,9	
							Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila	75%	90%	
5.	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Daerah melalui Tim Terpadu	0	38	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial - Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5  6,5  77,36	6,9  6,9  78,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		70,05	70,25	
							Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	75%	90%	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	8	8	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					- Indeks Harmoni Religius			6,5	6,9	
					- Indeks Demokrasi Indonesia			77,36	78,56	
						Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi		74,47	75,67	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</li> <li>• Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</li> </ul>	100%	100%		
7.	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	400	800	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					- Indeks Harmoni Religius			6,5	6,9	
					- Indeks Demokrasi Indonesia			77,36	78,56	
						Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi		74,47	75,67	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</li> <li>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</li> </ul>	100%	100%	
								3,34	3,43	
8.	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2000	4000	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial - Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi		6,5	6,9	
								77,36	78,56	
								74,47	75,67	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</li> <li>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</li> </ul>	100%	100%	
								3,34	3,43	
9.	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	8	8	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								6,5	6,9	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					- Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			77,36	78,56	
						Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi		74,47	75,67	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</li> <li>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik</li> </ul>	100%	100%	
								3,34	3,43	
10.	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	19	38	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial - Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5	6,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								6,5	6,9	
								77,36	78,56	
						Indeks Kebebasan		83,01	84,21	
							Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75%	90%	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	19	19	Kementerian Dalam Negeri	- Indeks Harmoni Sosial - Indeks Harmoni Religius - Indeks Demokrasi Indonesia			6,5 6,5 77,36	6,9 6,9 78,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Indeks Kebebasan		83,01	84,21	
							Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75%	90%	

**Catatan :** Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing *(dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)*

**6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (Berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025)**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>F</b>	<b>Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden</b>				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Program Peningkatan Kewaspadaan		Pelaksanaan Koordinasi di	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
		Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
2	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
- Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Indeks Harmoni Sosial (Indeks)	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Harmoni Religius (Indeks)	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	77,06	77,36	77,66	77,96	78,26	78,56	78,86	
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Toleransi (Indeks)	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Kerjasama (Indeks)	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Kewarganegaraan (Indeks)	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Pluralisme (Indeks)	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Persentase)	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi	Indeks Kebebasan (Indeks)	82,71	83,01	83,31	83,61	83,91	84,21	84,51	
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)	74,17	74,47	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	69,45	70,25	70,75	71,25	71,75	72,25	72,75			

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					20.236.477.641,00		21.000.630.839,00		21.632.780.879,00		22.280.977.122,00		22.840.190.204,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.452.596.976,00		15.957.272.370,00		16.395.042.593,00		16.843.010.000,00		17.256.733.651,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	15.452.596.976,00	100	15.957.272.370,00	100	16.395.042.593,00	100	16.843.010.000,00	100	17.256.733.651,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.499.731.795,00		2.561.858.064,00		2.673.604.217,00		2.788.712.887,00		2.872.352.662,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	75,00	75,00	75,00	2.499.731.795,00	80,00	2.561.858.064,00	85,00	2.673.604.217,00	90,00	2.788.712.887,00	95,00	2.872.352.662,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					290.809.385,00		393.499.029,00		411.360.337,00		429.759.102,00		443.127.936,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	290.809.385,00	100	393.499.029,00	100	411.360.337,00	100	429.759.102,00	100	443.127.936,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	3,31	3,31	3,34		3,37		3,40		3,43		3,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					317.553.124,00		338.984.051,00		354.370.869,00		370.220.688,00		381.737.416,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,00	75,00	75,00	317.553.124,00	80,00	338.984.051,00	85,00	354.370.869,00	90,00	370.220.688,00	95,00	381.737.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					415.282.286,00		482.156.920,00		491.559.976,00		501.245.976,00		508.283.976,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	3,13	3,13	3,20	415.282.286,00	3,23	482.156.920,00	3,26	491.559.976,00	3,29	501.245.976,00	3,32	508.283.976,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	2,94	3,25	3,25		3,28		3,31		3,34		3,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					1.260.504.075,00		1.266.860.405,00		1.306.842.887,00		1.348.028.469,00		1.377.954.563,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	75,00	75,00	75,00	1.260.504.075,00	80,00	1.266.860.405,00	85,00	1.306.842.887,00	90,00	1.348.028.469,00	95,00	1.377.954.563,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					20236477641.00		21000630839.00		21632780879.00		22280977122.00		22840190204.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
- Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM				Indeks Harmoni Sosial (Indeks)					
					Indeks Harmoni Religius (Indeks)					
					Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)					
					Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama			Indeks Toleransi (Indeks)		
							Indeks Kerjasama (Indeks)			
					Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
				Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan			Indeks Kewarganegaraan (Indeks)		
					Indeks Pluralisme (Indeks)		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan			Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01.0007 - Peningkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka	
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat			Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinas Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinas Pimpinan Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi			Indeks Kebebasan (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat			Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
FINAL  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Indeks	3,13	3,13	3,20	3,23	3,26	3,29	3,32	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
4	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	%	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
5	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Indeks	3,31	3,31	3,34	3,37	3,40	3,43	3,46	
6	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indeks	2,94	3,25	3,25	3,28	3,31	3,34	3,37	
7	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				20.236.477.641,00		21.000.630.839,00		21.632.780.879,00		22.280.977.122,00		22.840.190.204,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.452.596.976,00		15.957.272.370,00		16.395.042.593,00		16.843.010.000,00		17.256.733.651,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	15.452.596.976,00	100	15.957.272.370,00	100	16.395.042.593,00	100	16.843.010.000,00	100	17.256.733.651,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		145.000.000,00		150.923.928,00		163.010.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	150.000.000,00	7	145.000.000,00	7	150.923.928,00	7	163.010.000,00	7	170.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		130.000.000,00		130.923.928,00		138.010.000,00		140.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	150.000.000,00	7	130.000.000,00	7	130.923.928,00	7	138.010.000,00	7	140.000.000,00		
8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.977.537.264,00		12.525.000.000,00		12.825.000.000,00		13.035.000.000,00		13.290.423.928,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	11.977.537.264,00	1	12.525.000.000,00	1	12.825.000.000,00	1	13.035.000.000,00	1	13.290.423.928,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		88		88		88		88		88			
8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.977.537.264,00		12.500.000.000,00		12.800.000.000,00		13.000.000.000,00		13.250.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		88	11.977.537.264,00	88	12.500.000.000,00	88	12.800.000.000,00	88	13.000.000.000,00	88	13.250.000.000,00		
8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.423.928,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.423.928,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				275.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		5	275.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00		
8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		171.309.723,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2	200.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	171.309.723,00		
8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
8.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		
8.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				75.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	75.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00		
8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		90	750.000.000,00	95	600.000.000,00	100	600.000.000,00	125	650.000.000,00	125	700.000.000,00		
8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		10	30.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				204.600.000,00		408.670.370,00		400.000.000,00		410.000.000,00		425.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	204.600.000,00	2	408.670.370,00	2	400.000.000,00	2	410.000.000,00	2	425.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		10		8		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0		1		1		1		1			
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	37.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
8.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				17.600.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	17.600.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00		
8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		208.670.370,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		10	150.000.000,00	8	208.670.370,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				860.000.000,00		805.892.000,00		884.408.665,00		950.000.000,00		990.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2	860.000.000,00	2	805.892.000,00	2	884.408.665,00	2	950.000.000,00	2	990.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		250		250		300		350		350			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		250	5.000.000,00	250	5.000.000,00	300	7.500.000,00	350	10.000.000,00	350	15.000.000,00		
8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				360.000.000,00		360.000.000,00		371.908.665,00		390.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2	360.000.000,00	2	360.000.000,00	2	371.908.665,00	2	390.000.000,00	2	400.000.000,00		
8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		40.892.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	45.000.000,00	1	40.892.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		
8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				450.000.000,00		400.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		6	450.000.000,00	6	400.000.000,00	6	430.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00		
8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619.710.000,00		622.710.000,00		679.710.000,00		730.000.000,00		745.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	619.710.000,00	1	622.710.000,00	1	679.710.000,00	1	730.000.000,00	1	745.000.000,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		15		15		15		15		15			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		6		6		6		6		6			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0		1		1		1		1			
8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				218.830.000,00		218.830.000,00		218.830.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		6	218.830.000,00	6	218.830.000,00	6	218.830.000,00	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00		
8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.880.000,00		85.880.000,00		85.880.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		15	85.880.000,00	15	85.880.000,00	15	85.880.000,00	15	90.000.000,00	15	90.000.000,00		
8.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5	15.000.000,00	5	8.000.000,00	5	15.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00		
8.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	200.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
8.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.499.731.795,00		2.561.858.064,00		2.673.604.217,00		2.788.712.887,00		2.872.352.662,00		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	75,00	75,00	2.499.731.795,00	80,00	2.561.858.064,00	85,00	2.673.604.217,00	90,00	2.788.712.887,00	95,00	2.872.352.662,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.499.731.795,00		2.561.858.064,00		2.673.604.217,00		2.788.712.887,00		2.872.352.662,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		40	2.499.731.795,00	40	2.561.858.064,00	50	2.673.604.217,00	75	2.788.712.887,00	85	2.872.352.662,00		
	Jumlah Paskibraka (Orang)		36		36		36		36					
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)		36		36		36		36					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		75		75		75		85		100			
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1		1		1		1		1			
8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2.500.000,00		2.258.064,00		2.500.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.258.064,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00		
8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				75.000.000,00		98.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		75	75.000.000,00	75	98.000.000,00	75	100.000.000,00	85	125.000.000,00	100	140.000.000,00		
8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	50	75.000.000,00	75	100.000.000,00	85	120.000.000,00		
8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50.000.000,00		76.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		1	50.000.000,00	1	76.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50.000.000,00		60.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00		
8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				15.000.000,00		15.000.000,00		15.161.276,00		15.161.276,00		15.500.000,00		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)		36	15.000.000,00	36	15.000.000,00	36	15.161.276,00	36	15.161.276,00	36	15.500.000,00		
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				2.000.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)		1	2.000.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.500.000,00		
8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				382.731.795,00		395.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)		1	382.731.795,00	1	395.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	410.000.000,00		
8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka				1.850.000.000,00		1.840.000.000,00		1.869.842.941,00		1.919.951.611,00		1.925.852.662,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)		36	1.850.000.000,00	36	1.840.000.000,00	36	1.869.842.941,00	36	1.919.951.611,00	36	1.925.852.662,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				290.809.385,00		393.499.029,00		411.360.337,00		429.759.102,00		443.127.936,00		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	290.809.385,00	100	393.499.029,00	100	411.360.337,00	100	429.759.102,00	100	443.127.936,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	3,31	3,34		3,37		3,40		3,43		3,46			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8.000.000,00		6.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	6.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9.000.000,00		6.999.029,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	6.999.029,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				138.809.385,00		200.000.000,00		200.000.000,00		212.759.102,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		150	138.809.385,00	150	200.000.000,00	150	200.000.000,00	150	212.759.102,00	150	220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50.000.000,00		80.000.000,00		94.360.337,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		50	50.000.000,00	50	80.000.000,00	50	94.360.337,00	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00		
8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		106.127.936,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	106.127.936,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				317.553.124,00		338.984.051,00		354.370.869,00		370.220.688,00		381.737.416,00		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,00	75,00	317.553.124,00	80,00	338.984.051,00	85,00	354.370.869,00	90,00	370.220.688,00	95,00	381.737.416,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				317.553.124,00		338.984.051,00		354.370.869,00		370.220.688,00		381.737.416,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		1	317.553.124,00	1	338.984.051,00	1	354.370.869,00	1	370.220.688,00	1	381.737.416,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		100		100		100		100		100			
8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5.000.000,00		3.750.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	3.750.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5.000.000,00		3.234.051,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	3.234.051,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				85.000.000,00		100.000.000,00		109.370.869,00		125.220.688,00		136.737.416,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		100	85.000.000,00	100	100.000.000,00	100	109.370.869,00	100	125.220.688,00	100	136.737.416,00		
8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				122.553.124,00		132.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		50	122.553.124,00	50	132.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00		
8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				415.282.286,00		482.156.920,00		491.559.976,00		501.245.976,00		508.283.976,00		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	3,13	3,20	415.282.286,00	3,23	482.156.920,00	3,26	491.559.976,00	3,29	501.245.976,00	3,32	508.283.976,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	2,94	3,25		3,28		3,31		3,34		3,37			
8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				415.282.286,00		482.156.920,00		491.559.976,00		501.245.976,00		508.283.976,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	415.282.286,00	1	482.156.920,00	1	491.559.976,00	1	501.245.976,00	1	508.283.976,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		150		150		150		150					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		50		50		50		50		50		50		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
8.01.05.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5.000.000,00		28.156.920,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	28.156.920,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00			
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00			
8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				246.282.286,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		282.038.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		150	246.282.286,00	150	275.000.000,00	150	275.000.000,00	150	275.000.000,00	150	282.038.000,00		
8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				65.000.000,00		70.000.000,00		77.559.976,00		87.245.976,00		87.245.976,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	50	77.559.976,00	50	87.245.976,00	50	87.245.976,00		
8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.260.504.075,00		1.266.860.405,00		1.306.842.887,00		1.348.028.469,00		1.377.954.563,00		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	75,00	75,00	1.260.504.075,00	80,00	1.266.860.405,00	85,00	1.306.842.887,00	90,00	1.348.028.469,00	95,00	1.377.954.563,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.260.504.075,00		1.266.860.405,00		1.306.842.887,00		1.348.028.469,00		1.377.954.563,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		150	1.260.504.075,00	150	1.266.860.405,00	150	1.306.842.887,00	150	1.348.028.469,00	150	1.377.954.563,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		150		150		150		175		175			
8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3.070.646,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	3.070.646,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00		
8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150.000.000,00		130.860.405,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		150	150.000.000,00	150	130.860.405,00	150	135.000.000,00	175	145.000.000,00	175	150.000.000,00		
8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				116.783.429,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		150	116.783.429,00	150	100.000.000,00	150	105.000.000,00	150	110.000.000,00	150	115.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				250.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		6	250.000.000,00	6	80.000.000,00	6	85.000.000,00	6	90.000.000,00	6	95.000.000,00		
8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				737.650.000,00		950.000.000,00		974.842.887,00		995.028.469,00		1.008.954.563,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	737.650.000,00	1	950.000.000,00	1	974.842.887,00	1	995.028.469,00	1	1.008.954.563,00		

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					20.236.477.641,00		21.000.630.839,00		21.632.780.879,00		22.280.977.122,00		22.840.190.204,00			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.452.596.976,00		15.957.272.370,00		16.395.042.593,00		16.843.010.000,00		17.256.733.651,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	15.452.596.976,00	100	15.957.272.370,00	100	16.395.042.593,00	100	16.843.010.000,00	100	17.256.733.651,00	8.01.0.00.0.00.01.00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.000.000,00		145.000.000,00		150.923.928,00		163.010.000,00		170.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		150.000.000,00	7	145.000.000,00	7	150.923.928,00	7	163.010.000,00	7	170.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0			1		1		1		1				
8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00		130.000.000,00		130.923.928,00		138.010.000,00		140.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		150.000.000,00	7	130.000.000,00	7	130.923.928,00	7	138.010.000,00	7	140.000.000,00			
8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00			
8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.977.537.264,00		12.525.000.000,00		12.825.000.000,00		13.035.000.000,00		13.290.423.928,00			
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		11.977.537.264,00	1	12.525.000.000,00	1	12.825.000.000,00	1	13.035.000.000,00	1	13.290.423.928,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		88			88		88		88						
8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.977.537.264,00		12.500.000.000,00		12.800.000.000,00		13.000.000.000,00		13.250.000.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			88	11.977.537.264,00	88	12.500.000.000,00	88	12.800.000.000,00	88	13.000.000.000,00	88	13.250.000.000,00			
8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.423.928,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.423.928,00			
8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00			
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	85.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	120.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			6		6		6		6		6				
8.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00			
8.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			6	70.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	85.000.000,00	6	85.000.000,00			
8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					120.749.712,00		145.000.000,00		145.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		2	120.749.712,00	2	145.000.000,00	2	145.000.000,00	2	155.000.000,00	2	160.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		1		1		1		1		1				
8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					95.749.712,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		2	95.749.712,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	130.000.000,00			
8.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.435.000.000,00		1.205.000.000,00		1.210.000.000,00		1.285.000.000,00		1.356.309.723,00			
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			1	1.435.000.000,00	1	1.205.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.285.000.000,00	1	1.356.309.723,00			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			10		10		10		10		10				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			90		95		100		125		125				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			2		2		2		2		2				
8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					275.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			5	275.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00			
8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00			
8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		171.309.723,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			2	200.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	171.309.723,00			
8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00			
8.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00			
8.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					75.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	1	75.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00			
8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					750.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		90	95	750.000.000,00	95	600.000.000,00	100	600.000.000,00	125	650.000.000,00	125	700.000.000,00			
8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		10	10	30.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00			
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					204.600.000,00		408.670.370,00		400.000.000,00		410.000.000,00		425.000.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	2	204.600.000,00	2	408.670.370,00	2	400.000.000,00	2	410.000.000,00	2	425.000.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			2		2		2		2		2				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			10		8		10		10		10				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		1		1		1		1				
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00			
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			2	37.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00			
8.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					17.600.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			2	17.600.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00			
8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00		208.670.370,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			10	150.000.000,00	8	208.670.370,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00			
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					860.000.000,00		805.892.000,00		884.408.665,00		950.000.000,00		990.000.000,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			2	860.000.000,00	2	805.892.000,00	2	884.408.665,00	2	950.000.000,00	2	990.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			250		250		300		350		350				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			6		6		6		6		6				
8.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			250	5.000.000,00	250	5.000.000,00	300	7.500.000,00	350	10.000.000,00	350	15.000.000,00			
8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					360.000.000,00		360.000.000,00		371.908.665,00		390.000.000,00		400.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			2	360.000.000,00	2	360.000.000,00	2	371.908.665,00	2	390.000.000,00	2	400.000.000,00			
8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					45.000.000,00		40.892.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			1	45.000.000,00	1	40.892.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00			
8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					450.000.000,00		400.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			6	450.000.000,00	6	400.000.000,00	6	430.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00			
8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					619.710.000,00		622.710.000,00		679.710.000,00		730.000.000,00		745.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	619.710.000,00	1	622.710.000,00	1	679.710.000,00	1	730.000.000,00	1	745.000.000,00			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			5		5		5		5		5				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			6		6		6		6		6				
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		1		1		1		1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			15		15		15		15		15				
8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					218.830.000,00		218.830.000,00		218.830.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			6	218.830.000,00	6	218.830.000,00	6	218.830.000,00	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00			
8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					85.880.000,00		85.880.000,00		85.880.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			15	85.880.000,00	15	85.880.000,00	15	85.880.000,00	15	90.000.000,00	15	90.000.000,00			
8.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					15.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			5	15.000.000,00	5	8.000.000,00	5	15.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00			
8.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	200.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00			
8.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0	0,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00			
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.499.731.795,00		2.561.858.064,00		2.673.604.217,00		2.788.712.887,00		2.872.352.662,00			
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	75,00	75,00	75,00	2.499.731.795,00	80,00	2.561.858.064,00	85,00	2.673.604.217,00	90,00	2.788.712.887,00	95,00	2.872.352.662,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.499.731.795,00		2.561.858.064,00		2.673.604.217,00		2.788.712.887,00		2.872.352.662,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)			1	2.499.731.795,00	1	2.561.858.064,00	1	2.673.604.217,00	1	2.788.712.887,00	1	2.872.352.662,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)			40		40		50		75		85				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)			75		75		75		85		100					
	Jumlah Paskibraka (Orang)			36		36		36		36		36					
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)			36		36		36		36		36					
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			1		1		1		1		1					
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)			1		1		1		1		1					
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)			1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)			1		1		1		1		1				
8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00			
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					2.500.000,00		2.258.064,00		2.500.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		1	2.500.000,00	1	2.258.064,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00			
8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					75.000.000,00		98.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)			75	75.000.000,00	75	98.000.000,00	75	100.000.000,00	85	125.000.000,00	100	140.000.000,00			
8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)			40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	50	75.000.000,00	75	100.000.000,00	85	120.000.000,00			
8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					50.000.000,00		76.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)			1	50.000.000,00	1	76.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00			
8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					50.000.000,00		60.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)			1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00			
8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					15.000.000,00		15.000.000,00		15.161.276,00		15.161.276,00		15.500.000,00		RIAU	
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka duta pancasila (Orang)			36	15.000.000,00	36	15.000.000,00	36	15.161.276,00	36	15.161.276,00	36	15.500.000,00			
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					2.000.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.500.000,00		RIAU	
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)			1	2.000.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.500.000,00			
8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka					382.731.795,00		395.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)			1	382.731.795,00	1	395.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	410.000.000,00			
8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka					1.850.000.000,00		1.840.000.000,00		1.869.842.941,00		1.919.951.611,00		1.925.852.662,00		RIAU	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)			36	1.850.000.000,00	36	1.840.000.000,00	36	1.869.842.941,00	36	1.919.951.611,00	36	1.925.852.662,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					290.809.385,00		393.499.029,00		411.360.337,00		429.759.102,00		443.127.936,00			
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	290.809.385,00	100	393.499.029,00	100	411.360.337,00	100	429.759.102,00	100	443.127.936,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	3,31	3,31	3,34		3,37		3,40	3,43		3,46					
8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					290.809.385,00		393.499.029,00		411.360.337,00		429.759.102,00		443.127.936,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)			50	290.809.385,00	50	393.499.029,00	50	411.360.337,00	60	429.759.102,00	60	443.127.936,00			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1	1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)			150		150		150		150		150				
8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					8.000.000,00		6.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	8.000.000,00	1	6.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00			
8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					9.000.000,00		6.999.029,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	9.000.000,00	1	6.999.029,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00			
8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					138.809.385,00		200.000.000,00		200.000.000,00		212.759.102,00		220.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)			150	138.809.385,00	150	200.000.000,00	150	200.000.000,00	150	212.759.102,00	150	220.000.000,00			
8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					50.000.000,00		80.000.000,00		94.360.337,00		100.000.000,00		100.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)			50	50.000.000,00	50	80.000.000,00	50	94.360.337,00	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00			
8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		106.127.936,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)			1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	106.127.936,00			
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					317.553.124,00		338.984.051,00		354.370.869,00		370.220.688,00		381.737.416,00			
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,00	75,00	75,00	317.553.124,00	80,00	338.984.051,00	85,00	354.370.869,00	90,00	370.220.688,00	95,00	381.737.416,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					317.553.124,00		338.984.051,00		354.370.869,00		370.220.688,00		381.737.416,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)			1	317.553.124,00	1	338.984.051,00	1	354.370.869,00	1	370.220.688,00	1	381.737.416,00			
	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)			100		100		100		100						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)			50		50		50		50		50				
	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					5.000.000,00		3.750.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	1	3.750.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					5.000.000,00		3.234.051,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	1	3.234.051,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					85.000.000,00		100.000.000,00		109.370.869,00		125.220.688,00		136.737.416,00		KAB. KAMPAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)			100	85.000.000,00	100	100.000.000,00	100	109.370.869,00	100	125.220.688,00	100	136.737.416,00			
8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					122.553.124,00		132.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)			50	122.553.124,00	50	132.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00			
8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)			1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					415.282.286,00		482.156.920,00		491.559.976,00		501.245.976,00		508.283.976,00			
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	3,13	3,13	3,20	415.282.286,00	3,23	482.156.920,00	3,26	491.559.976,00	3,29	501.245.976,00	3,32	508.283.976,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	2,94	3,25	3,25		3,28		3,31		3,34		3,37				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)			150		150		150		150		150				
8.01.05.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					5.000.000,00		28.156.920,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1	5.000.000,00	1	28.156.920,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					246.282.286,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		282.038.000,00		RIAU	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)			150	246.282.286,00	150	275.000.000,00	150	275.000.000,00	150	275.000.000,00	150	282.038.000,00			
8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					65.000.000,00		70.000.000,00		77.559.976,00		87.245.976,00		87.245.976,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)			50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	50	77.559.976,00	50	87.245.976,00	50	87.245.976,00			
8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)			1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.260.504.075,00		1.266.860.405,00		1.306.842.887,00		1.348.028.469,00		1.377.954.563,00			
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	75,00	75,00	75,00	1.260.504.075,00	80,00	1.266.860.405,00	85,00	1.306.842.887,00	90,00	1.348.028.469,00	95,00	1.377.954.563,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.260.504.075,00		1.266.860.405,00		1.306.842.887,00		1.348.028.469,00		1.377.954.563,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			150	1.260.504.075,00	150	1.266.860.405,00	150	1.306.842.887,00	175	1.348.028.469,00	175	1.377.954.563,00			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)			6		6		6		6		6				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			150		150		150		150		150				
8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00			
8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					3.070.646,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		KOTA PEKANBARU	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		1	3.070.646,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00			
8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					150.000.000,00		130.860.405,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			150	150.000.000,00	150	130.860.405,00	150	135.000.000,00	175	145.000.000,00	175	150.000.000,00			
8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					116.783.429,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			150	116.783.429,00	150	100.000.000,00	150	105.000.000,00	150	110.000.000,00	150	115.000.000,00			
8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					250.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)			6	250.000.000,00	6	80.000.000,00	6	85.000.000,00	6	90.000.000,00	6	95.000.000,00			
8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi					737.650.000,00		950.000.000,00		974.842.887,00		995.028.469,00		1.008.954.563,00		RIAU	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	1	737.650.000,00	1	950.000.000,00	1	974.842.887,00	1	995.028.469,00	1	1.008.954.563,00			

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
1.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
2.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
2.	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
3.	Indeks Harmoni Religius	Indeks	0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	77,06	77,36	77,66	77,96	78,26	78,56	78,86	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,45	70,25	70,75	71,25	71,75	72,25	72,75	
6.	Indeks Kewarganegaraan	Indeks	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
7.	Indeks Toleransi	Indeks	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
8.	Indeks Pluralisme	Indeks	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
9.	Indeks Kerjasama	Indeks	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
10.	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	
11.	Indeks Kebebasan	Indeks	82,71	83,01	83,31	83,61	83,91	84,21	84,51	
12.	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	74,17	74,47	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
FINAL RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	positif	%	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
3.	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	positif	Indeks	3,13	3,13	3,20	3,23	3,26	3,29	3,32	
4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	positif	Persentase	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
5.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	positif	Indeks	2,94	3,25	3,25	3,28	3,31	3,34	3,37	
7.	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	positif	Indeks	3,31	3,31	3,34	3,37	3,40	3,43	3,46	
8.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	positif	Persentase	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

